

**KANTOR KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II TEGAL
LANDASAN KONSEPSUAL PERENCANAAN DAN PERANCANGAN**

TUGAS AKHIR



Oleh :

SAMSUL MA'ARIP

87 340 015

87005101311610015

**JURUSAN TEKNIK ARSITEKTUR
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

1996

**KANTOR KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II TEGAL**

AN KONSEPSUAL PERENCANAAN DAN PERANCANGAN

**ISLAM
TUGAS AKHIR**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
dalam Menempuh Gelar Kesarjanaan S-1
pada Jurusan Teknik Arsitektur
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**

Oleh:

Samsul Ma'arif

87 340 015

87005101311610015

**JURUSAN TEKNIK ARSITEKTUR
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

1996

**KANTOR KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II TEGAL**

LANDASAN KONSEPSUAL PERENCANAAN DAN PERANCANGAN



**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
dalam Menempuh Gelar Kesarjanaan S-1
pada Jurusan Teknik Arsitektur
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**

Oleh:

Samsul Ma'arif

87 340 015

87005101311610015

**JURUSAN TEKNIK ARSITEKTUR
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

1996

**KANTOR KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II TEGAL**

LANDASAN KONSEPSUAL PERENCANAAN DAN PERANCANGAN

TUGAS AKHIR



Oleh :

Samsul Ma'arif

87 340 015

87005101311610015

Yogyakarta, 17 Januari 1996

Menyetujui

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Pembantu

Ir. Amir Adenan

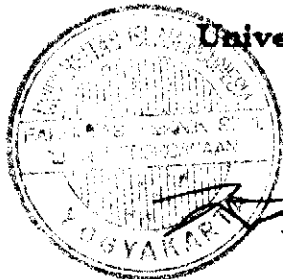
Ir. Wiryono Raharjo, MArch

Mengetahui

Ketua Jurusan Teknik Arsitektur

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Ir. Wiryono Raharjo, MArch.

ABSTRAKSI

Kota dapat dipandang perlu sebagai organisme hidup yang terdiri dari atas berbagai unsur pembentuknya, yakni penduduk dan berbagai kegiatan sosial-ekonominya, serta sistem dan jaringan fasilitas-utilitas penunjang kegiatan-kegiatan di atas. Dari waktu ke waktu, unsur-unsur pembentuk kota tersebut mempunyai sifat yang dinamis, terutama disebabkan karena adanya perkembangan dan pertumbuhan penduduk kota yang bersangkutan. Perkembangan dan pertumbuhan tersebut senantiasa diikuti oleh peningkatan berbagai kebutuhan, baik yang berasal dari peningkatan kesejahteraan penduduknya maupun kepentingan-kepentingan pemerintah kota untuk memperbesar status, fungsi, dan peran kota selaras dengan kontribusi kota secara regional.

Kebijaksanaan ini tentu akan memberikan implikasi yang luas terhadap perkembangan kota Slawi dimasa datang, baik dari segi ruang fisik maupun fungsi peranan kotanya. Menghadapi implikasi yang akan muncul sebagai akibat peningkatan status Kota Slawi menjadi Kota Administratif maka program Pemerintah Daerah Tingkat II untuk memindahkan Ibukota Kabupaten dari Kotamadya ke Kota Slawi dinilai sebagai langkah yang tepat.

KATA PENGANTAR

Assalamu' alaikum. Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah.SWT, atas selesainya penulisan tugas akhir ini dengan mengambil judul Kantor Kabupaten Dati II Tegal, Jawa-Tengah, yang merupakan persyaratan akhir untuk dapat meraih gelar sarjana teknik di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Ir. Wiryono Raharjo. MArch, selaku ketua Jurusan Teknik Arsitektur Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Ir. Amir Adenan, selaku dosen pembimbing utama Jurusan Teknik Arsitektur Universitas Indonesia Yogyakarta.
3. Bapak Ir. Wiryono Raharjo. MArch, selaku dosen pembimbing pembantu Jurusan Teknik Arsitektur Universitas Islam Indonesia.
4. Ayahanda dan Ibunda (Almarhumah), tercinta yang telah membesarkan dan memberikan kasih sayang serta dorongan semangat moril dan do`a.
5. Kakak dan Adik tercinta serta rekan Dadang dan Dodi yang telah banyak membantu hingga terselesainya tulisan ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis persembahkan karya yang sederhana ini kepada almamater tercinta untuk dijadikan acuan dasar bagi mahasiswa Jurusan Teknik Universitas Islam Indonesia Yogyakarta khususnya dan mahasiswa lain umumnya.

Wassalamu' alaikum Wr. Wb.



Yogyakarta, Januari 1996

(SAMSUL MA'ARIP)

2.2. Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Dati	
II Tegal	12
2.2.1. Pembentukan Pemerintah Dati II .	12
2.2.2. Landasan Hukum	12
2.2.3. Pola Organisasi Pemerintahan Ka	
bupaten Dati II Tegal	14
2.2.4. Tujuan Pemerintah Kabupaten Dati	
II Tegal	16
2.2.5. Susunan Organisasi dan Tata Ker	
ja Sekretariat Wilayah Dati II	
Tegal	17
2.2.5.1. Tata Kerja Pemerintahan	
Kabupaten Tegal	17
2.2.5.2. Struktur Organisasi Pe	
merintah Kabupaten Dati	
II Tegal	19
 BAB III TINJAUAN SITUASI KABUPATEN DATI II TEGAL	
3.1. Deskripsi Wilayah	23
3.1.1. Batas dan Luas Wilayah	23
3.1.2. Topografi	25
3.2. Perkembangan Wilayah Kabupaten Dati II	
Tegal	25
3.2.1. Kondisi Umum Kabupaten Dati II	
Tegal	25
3.2.2. Kondisi Kabupaten Dati II Tegal	26

3.2.2.1.	Jumlah dan Perkembangan Penduduk	26
3.2.2.2.	Sub Wilayah Pembangunan (SWP)	28
3.3.	Tinjauan Kota Slawi	30
3.3.1.	Kondisi Umum Wilayah Slawi	30
3.3.2.	Batas dan Luas Wilayah	30
3.3.3.	Kondisi Kota Slawi	31
3.3.4.	Kebutuhan Pengembangan Fasilitas Sosial dan Ekonomi Kota Slawi ..	32
3.3.5.	Penetapan Fungsi BWG Kota Slawi	34
BAB IV ANALISA KANTOR PUSAT PEMERINTAH		
4.1.	Analisa Eksternal	41
4.1.1.	Analisa Pemilihan Lokasi	41
4.1.2.	Penentuan Lokasi	42
4.2.	Pengolahan Tapak yang Mendukung Citra	53
4.2.1.	Pemanfaatan Lahan	54
4.3.	Organisasi Ruang	57
4.4.	Analisa Pola Penentuan Fungsi Bangunan	61
4.5.	Analisa Kebutuhan Ruang Bangunan	62
4.5.1.	Internal	62
4.5.2.	Ruang Dalam	62
4.5.3.	Analisa Besaran Ruang	66
4.5.3.1.	Bentuk Ruang	66
4.5.3.2.	Alternatif Bentuk Ruang	67
4.5.3.3.	Hubungan Ruang	68

4.5.4. Analisa Tata Ruang Luar	71
4.6. Analisa Sistem Sirkulasi	72
4.7. Analisa Bentuk Penampilan Bangunan	73
4.8. Sistem Struktur dan Utilitas	77

BAB V KESIMPULAN

5.1. Perencanaan dan Perancangan Kantor Kabu paten Dati II Tegal	79
5.2. Eksternal	79
5.2.1. Lokasi/Site	79
5.2.2. Prinsip Pengolahan Site	79
5.3. Internal	80
5.3.1. Kebutuhan Ruang	80
5.3.2. Bentuk ruang	80
5.3.3. Tata Ruang Luar	80
5.3.4. Sistem Sirkulasi	80
5.4. Bentuk Penampilan Bangunan	81

BAB VI KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN

5.1. Konsep Perencanaan Kantor Kabupaten Da ti II Tegal	82
5.1.1. Konsep Pemilihan Lokasi	82
5.1.2. Penentuan Site	82
5.1.3. Pengolahan Tapak	84
5.2. Konsep Perancangan	84
5.2.1. Besaran Ruang	85
5.2.2. Persyaratan Ruang	92
5.2.3. Sistem Peruangan	92
5.2.4. Sistem Pencahayaan	93

5.2.5. Penanggulangan Kebisingan/Nois .	94
5.2.6. Konsep Penampilan Bangunan	95
5.2.7. Konsep Struktur dan Utilitas ...	95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
- Gambar Ciri-ciri Keseimbangan	55
- Gambar Peletakan Bangunan	56
- Gambar Pengelompokan Organisasi Ruang	58
- Gambar Pengelompokan Unit-unit Bangunan	61
- Gambar Pencapaian Masuk Kedalam Bangunan	75
- Gambar Peraturan Garis Sempadan Bangunan	83
- Gambar Penanggulangan Kebisingan/nois	94



DAFTAR PETA

	Halaman
- Peta Wilayah perencanaan Kab. Tegal	24
- Peta Sub Wilayah Pembangunan Kota Slawi	29
- Peta BWK Kota Slawi	31
- Peta BWG Kota Slawi	37
- Peta Pembagian Ruang Komponen Kota Slawi	44



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah disebutkan bahwa setiap wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II mempunyai Ibukota yang berfungsi sebagai tempat bagi pemerintah di Daerah untuk melaksanakan pembinaan kehidupan masyarakat di segala bidang.

"Daerah Otonom, selanjutnya di sebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan per-undang-undangan yang berlaku".¹

Bagi suatu Daerah Otonom Tingkat II yang ibukotanya berada di luar Daerah/wilayahnya, akan mengakibatkan kurang leluasaan dan bahkan tidaklah mungkin untuk mengatur dan menata kota/bagian wilayah yang dikuasai oleh Daerah Otonom Tingkat II lainnya. Akibat lebih jauh dari itu adalah Otonomi daerah yang merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak dapat dilaksanakan dengan baik secara berdayaguna.

1. Dikutip dari Marsono (E.D), Himpunan Peraturan tentang Pemerintahan di Daerah, Penerbit Jembatan, Jakarta, 1986, hal. 2-3.

ini sekaligus merupakan pembatas juga bagi pemerintah kabupaten untuk menambah pembangunan perkantoran.

Agar pemerintah di daerah dapat berlangsung di perlukan unsur-unsur manajemen yang akan melayani masyarakat secara administratif maupun operasional, kemudian untuk memperoleh efisiensi kegiatan bekerja, pelayanan perlu didukung oleh organisasi pemerintah, personil, peralatan dan wadah kegiatan yang efisien. Dengan kondisi demikian maka di bangun suatu wadah pemerintahan yaitu perkantoran kabupaten Daerah Tingkat II Tegal.

Kantor kabupaten sebagai fungsi pelayanan kepada masyarakat yang di dalamnya terkait fungsi koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan, pusat pembinaan dan pelayanan masyarakat di tuntut dalam kemudahan pencapaian (dalam arti kedekatan, pemerataan dan kejelasan pencapaian oleh masyarakat yang dilayani), serta kemudahan interaksi dan komunikasi terhadap lokasi pusat-pusat pemerintahan kecamatan.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal bermaksud memindahkan Ibukotanya dari wilayah Kotamadya Dati II Tegal ke dalam wilayah Kabupaten Tegal baik dalam rangka Otonomi Daerah maupun pengembangan wilayah pada umumnya dan perkembangan perkotaan pada khususnya.

Adapun alasan perlunya pemindahan Ibukota mencakup tiga hal pokok yaitu :

a. Ditinjau dari Ketentuan Hukum.

Ibukota sebagai pusat Pemerintahan pada hakekatnya harus merupakan salah satu dari kota-kota yang berada di wilayahnya. Adalah suatu hal yang kurang tepat apabila Ibukota suatu wilayah berada di wilayahnya.

b. Ditinjau dari Masalah Perkembangan Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal.

Masalah perkembangan Kotamadya Dati II Tegal dewasa ini ditandai oleh fenomena sebagai berikut :

1. Jumlah penduduk Kotamadya pada tahun 1990 mencapai 162.952,43 jiwa dan mempunyai kenaikan rata-rata 1,98% dibanding dengan luas wilayah seluas 1.267,13 Ha, maka dapat diperoleh angka kepadatan penduduk rata-rata sebesar 134/Ha, yang berarti telah melebihi tingkat kepadatan perkotaan maksimal (100/Ha).

c. Ditinjau dari Masalah Perkembangan Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal

Masalah perkembangan Kabupaten Dati II Tegal dewasa ini ditandai oleh fenomena sebagai berikut :

1. Jumlah penduduk Kabupaten Dati II Tegal pada tahun 1990 adalah 1.239.351 jiwa, dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 1,20% tiap tahun.

2. Kepadatan penduduk yang tinggi di sekitar Kotamadya Tegal tersebut merupakan salah satu indikator bahwa penduduk berorientasi terus ke kota Tegal yang sebenarnya telah banyak menghadapi persoalan kepadatan. Dilain pihak, sebenarnya masih banyak wilayah Kabupaten yang relatif lebih rendah kepadatannya. Hal ini dipandang kurang menguntungkan ditinjau dari segi pengembangan wilayah, karena hal ini tidak mencerminkan adanya perkembangan yang merata di tiap wilayah.

3. Dengan demikian, maka sesuai dengan alasan :

- a. Di dalam kaitannya dengan strategi pengembangan wilayah Kabupaten.
- b. Di dalam kaitannya dengan perubahan masalah teknis untuk mengembangkan pemukiman perkotaan yang baik dan terarah.
- c. Di dalam kaitannya dengan usaha memecahkan masalah pelayanan administratif.

Dipandang perlu memindahkan Ibukota Kabupaten Dati II Tegal dari wilayah Kotamadya Dati II Tegal ke wilayah administratif Kabupaten Dati II Tegal.

1.2. PERMASALAHAN

Dari uraian yang tertera di dalam latar belakang maka dapat diambil kesimpulan mengenai permasalahan sebagai berikut:

- Bagaimana menempatkan suatu bangunan perkantoran yang memudahkan dalam pencapaian, sesuai dengan

fungisinya sebagai pusat pelayanan kepada masyarakat.

- Bagaimana merencanakan/merancang suatu kompleks pemerintahan kabupaten Dati II Tegal menjadi pusat orientasi warga baik secara simbolis maupun fungsional melalui tata ruangnya.
- Bagaimana menampilkan bentuk fisik kantor Bupati sebagai salah satu prioritas utama sebagai wadah kegiatan pemerintah Dati II Tegal yang sesuai dengan fungsi dan kedudukannya dalam pelayanan terhadap masyarakat.

1.3. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Menyusun konsep perencanaan dan perancangan tata ruang pusat pemerintahan Kabupaten Dati II Tegal dengan fasilitas kantor Bupatinya, atas dasar fungsi dan peranan terhadap kota kedalam suatu uraian proses perencanaan fisik yang didasarkan pada pengkajian kondisi yang ada.

2. Sasaran

Memberikan alternatif desain kantor kabupaten Dati II Tegal melalui suatu analisa dan studi lokasi pusat pemerintahan khususnya dari faktor kondisi fisik dan lingkungannya.

1.4. LINGKUP PEMBAHASAN

- Pembahasan ditinjau dari skala lingkungan kota (komplek pemerintahan) yang sebelumnya dibahas

Bab IV : Analisa, Sistem pelayanan, Pemilihan lokasi, Analisa tapak, Organisasi ruang, Kebutuhan ruang, Sistem sirkulasi, Analisa bentuk penampilan bangunan, Sistem struktur dan utilitas.

Bab V : Kesimpulan

Bab VI : Konsep perencanaan dan perancangan.



BAB II
TINJAUAN UMUM

2.1. TINJAUAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

2.1.1. Penjelasan

Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah dilaksanakan berdasarkan 3 azas yaitu :²

A. Azas Desentralisasi

Urusan-urusan Pemerintahan yang telah diserahkan kepada Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan azas desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab dari pada Daerah Otonom sepenuhnya. Dalam hal ini inisiatif sepenuhnya diserahkan kepada Daerah Otonom, yang meliputi :

- a. KEBIJAKSANAAN
- b. PERENCANAAN
- c. PELAKSANAAN
- d. PEMBIAYAAN
- e. PERANGKAT PELAKSANAANNYA

2. Kansil, Cet. Drs, SH, Pokok-Pokok pemerintahan di daerah. Aksara Baru, Jakarta 1985.

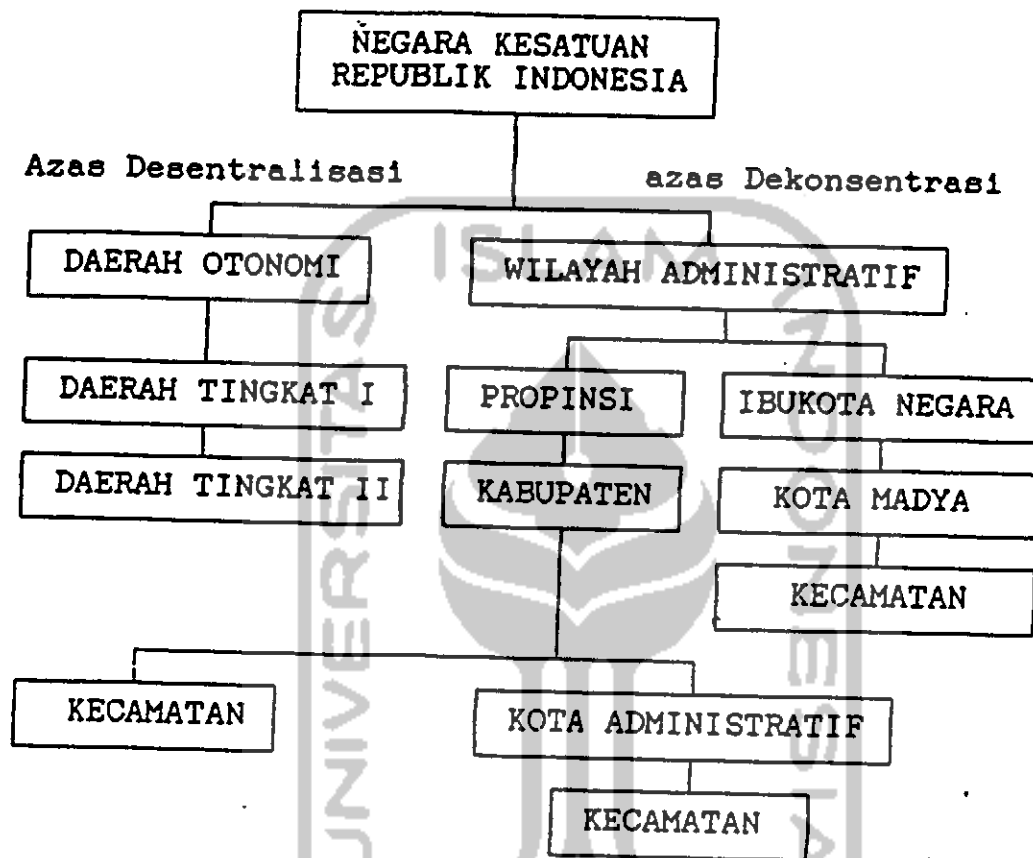
C. Tugas Pembantuan (Azas Medebewind)

Tidak semua urusan pemerintahan dapat diserahkan kepada Daerah Otonom untuk menjadi urusan rumah tangga daerahnya.

Beberapa urusan pemerintahan, masih tetap merupakan urusan pemerintah pusat. Akan tetapi adalah berat sekali bagi pemerintah pusat untuk menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan di daerah yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat itu, atas dasar dekonsentrasi mengingat terbatasnya kemampuan perangkat pemerintah pusat yang berada di daerah.

Dan juga ditinjau dari daya guna dan hasil guna, adalah kurang dapat dipertanggung jawabkan, apabila semua urusan Pemerintah Pusat di daerah harus dilaksanakan sendiri oleh perangkatnya, yang ada di daerah, karena hal itu akan membutuhkan tenaga dan biaya yang sangat besar jumlahnya.

Lagi pula mengingat sifatnya, berbagai urusan sulit untuk dapat dilaksanakan dengan baik, tanpa ikut sertanya Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut maka UU no.5 tahun 1974 memberikan kemungkinan untuk dilaksanakannya berbagai urusan pemerintahan di daerah menurut azas medebewind.



Skema pembagian wilayah.

Sumber : Sugiharjo.M, 1976 Tesis Jurusan FT. UGM

2.2.3. Pola Organisasi Pemerintah Dati II Tegal.

Perangkat Pemerintah Kabupaten daerah Tingkat II Tegal terdiri dari :

- Asisten tata praja

Asisten Tata Praja mempunyai tugas memberikan pelayanan staf dalam rangka penyelenggaraan koordinasi, Pengawasan dan terhadap pelaksanaan Pemerintah dalam lingkungan wilayah kerjanya berdasarkan pedoman yang

2.2.5. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah / Daerah Kabupaten Dati II Tegal

2.2.5.1. Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Dati II Tegal

Yang dimaksud Pemerintah Daerah Tingkat II Tegal adalah Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat II sebagai pemegang kekuasaan Legislatif yang mempunyai tugas : menetapkan landasan kebijaksanaan umum serta menyelenggarakan segala urusan pemerintah Daerah Tingkat II.

Khusus menyangkut tata kerja antar kepala daerah / Bupati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat II, masing-masing tidak bertanggung jawab, akan tetapi Kepala Daerah harus memberikan keterangan pertanggung jawaban tentang pelaksanaan Pemerintahan Daerah, agar Dewan Perwakilan Rakyat selalu dapat mengikuti dan mengawasi jalannya pemerintahan daerah.

Sedang dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban sebagai pimpinan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Dinas vertikal di daerah yang merupakan tangan-tangan kerja pemerintah baik dari unsur Departemen maupun non Departemen yaitu :

- Sekretaris Wilayah Daerah, yang bertugas menyelenggarakan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan serta pembinaan administrasi, organisasi serta ketata laksanaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Pemerintah Daerah.
- Sekretaris Dewan, unsur staf yang membantu pimpinan DPRD

dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

- Dinas - Dinas Daerah, sebagai unsur pelaksana Daerah.
- Perusahaan Daerah, merupakan unsur pelaksana pemerintah Daerah terutama bergerak dalam bidang usaha menambah penghasilan daerah.
- Inspektorat Wilayah Daerah, merupakan perangkat pengawasan umum terhadap penyelenggaraan Pemerintah Wilayah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa. Badan ini merupakan umum yang diperbantukan kepada Bupati dalam kedudukannya sebagai Kepala Wilayah yang secara taktis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Inspektur Wilayah Propinsi Jawa Tengah.
- Badan Perencana Pembangunan Daerah.
Badan staf yang bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah yang mempunyai tugas pokok dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan di daerah serta penilaian pelaksanaannya.
- Kantor Sospol, aparat Departemen Dalam Negeri yang diperbantukan kepada Bupati untuk menangani masalah Sosial Politik di Kabupaten.
- BP7, yaitu Lembaga Pemerintah yang melaksanakan pembinaan, Pendidikan, Pelaksanaan, Pedoman, Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.
- Mawil Hansip, merupakan pertahanan non militer yang integral dengan sistem pertahanan Nasional

2.2.5.3. Ikhtisar

Ikhtisar dari penulisan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut : Pengertian Otonomi adalah kebebasan bertindak, dan bukan diperintah dari atas, melainkan semata-mata atas kehendak dan inisiatif sendiri, guna kepentingan rumah tangga itu sendiri.

Pengertian tugas pembantuan (Medebewind) adalah bahwa penyelenggaraan kepentingan atau urusan tersebut sebenarnya oleh pemerintah pusat, tetapi Daerah Otonomi diikut sertakan. Dan caranya melaksanakan tugas pembantuan tersebut diserahkan sepenuhnya pada Daerah Otonomi yang dititik beratkan pada Daerah Tingkat II, oleh karena itu Daerah Otonom berwenang sepenuhnya untuk menentukan cara pelaksanaannya.

Dilihat dari maksud dan tujuan pemberian Otonomi Daerah yang dititik beratkan kepada pembangunan, maka pada hakekatnya Otonomi Daerah bagi Pemerintah Pusat, adalah lebih merupakan Kewajiban dari pada Hak, yaitu kewajiban Daerah Otonom yang bersangkutan untuk ikut melancarkan Pembangunan Nasional (Pembangunan daerah adalah merupakan penunjang Pembangunan Nasional).

Pembentukan suatu Daerah Otonom adalah dengan Undang-Undang. Karena Daerah Otonom itu keberadaannya bukan karena sejarah (historis) tapi adanya karena dibentuk dengan Undang-Undang sehingga dalam rangka penyerahan tersebut wewenang/urusan tersebut disertai

dengan perangkat, alat pelengkap dan sumber biayanya, sehingga dengan demikian urusan pemerintahan yang diserahkan itu dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya.

Didalam susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Dati II adalah mengingat luasnya tugas-tugas yang dihadapi oleh Kepala Daerah baik dalam fungsinya sebagai Kepala Wilayah Administratif maupun sebagai Kepala Daerah Otonom, maka pada dasarnya dipandang perlu adanya jabatan Wakil Kepala Daerah. Mengingat kondisi daerah yang berbeda-beda maka pelaksanaan pengisian jabatan Wakil Kepala Daerah tersebut akan diadakan menurut kebutuhan.

Mengingat Bupati adalah pemegang kekuasaan tertinggi di wilayah Kabupaten, dan bahwa Kantor Bupati adalah fasilitas fisik Pemerintah Dati II yang paling tinggi dalam arti simbolis maupun fungsional, maka perencanaan dan perancangan Kantor Bupati dalam komplek Pemerintahan Dati II Tegal harus dapat memberikan citra sebagai pusat pemerintahan. Dan diharapkan keberadaannya bisa memancarkan nilai-nilai yang diharapkan dapat mewujudkan satu prinsip pengakuan dari masyarakat, antara lain :

- Stabilitas, yaitu kemantapan dan keamanan pusat pemerintahan terhadap unsur-unsur atau tarikan dari luar.
- Accesibilitas, yaitu kemudahan pencapaian dari

BAB III

TINJAUAN SITUASI KABUPATEN DATI II TEGAL

3.1. Diskripsi Wilayah

3.1.1. Batas dan Luas Wilayah

Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal merupakan salah satu daerah Otonomi di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, yang terdiri dari 6 wilayah Pembantu Bupati, 18 Kecamatan, 272 Desa dan 6 Kelurahan.

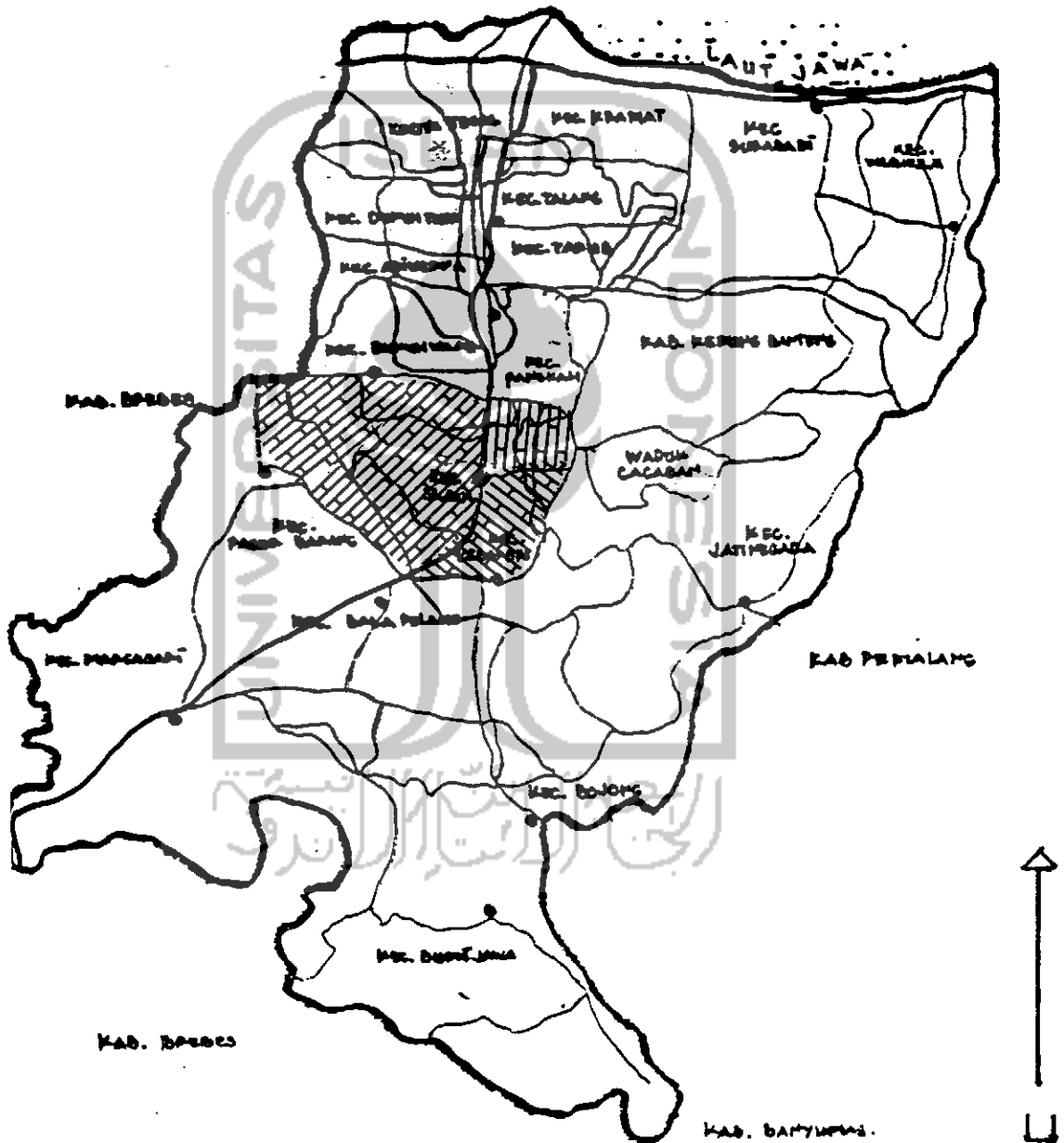
Secara geografis berada di antara $108^{\circ} 57,6 - 109^{\circ} 21,30$: Bujur Timur dan antara $6^{\circ} 50,4 - 7^{\circ} 15,03$ Lintang Selatan dengan luas wilayah 87.878,555 Ha.

Dilihat secara administrasi wilayah Kabupaten Dati II Tegal berbatasan dengan : 7)

- Sebelah Utara : Kotamadya Dati II Tegal dan laut Jawa.
- Sebelah Timur : Kabupaten Dati II Pemalang.
- Sebelah Barat : Kabupaten Dati II Brebes.
- Sebelah Selatan : Kabupaten Dati II Banyumas.

7) Rencana RTRW Kabupaten Dati II Tegal, Bab III.1

Untuk lebih jelasnya mengenai batas wilayah Kabupaten Dati II tegal dapat dilihat pada peta dibawah ini :



Gambar : 3.1. Peta wilayah perencanaan Kabupaten Tegal.

3.1.2. Topografi

Secara topografi wilayah Kabupaten Dati II Tegal sebelah utara merupakan daerah pantai, bagian tengah merupakan dataran rendah dan semakin keselatan merupakan dataran tinggi dengan ketinggian yang beragam (0% sampai diatas 40%), dimana sebelah selatan berbukit dan semakin ke utara relatif datar (0% sampai 15%).

3.2. Perkembangan Wilayah Kabupaten Dati II Tegal.

3.2.1. Kondisi Umum Wilayah Kabupaten Dati II Tegal

Untuk menumbuhkan dan mengembangkan wilayah Kabupaten dibutuhkan pusat-pusat pertumbuhan maupun pusat pelayanan yang nantinya identik dengan kegiatan-kegiatan perkotaan. Dari pusat-pusat tersebut diharapkan akan mempengaruhi daerah-daerah disekitarnya maupun hiterlandnya. Dilihat dari kondisi sosial ekonomi maupun fisik wilayah, maka kawasan strategis yang potensial sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan adalah:

- Kecamatan Slawi
- Kecamatan Pangkah
- kecamatan Dukuhturi
- Kecamatan Kramat
- Kecamatan Suradadi
- Kecamatan Warureja
- Kecamatan Tarub
- Kecamatan Adiwerna
- Kecamatan Talang
- Kecamatan Margasari

- Kecamatan Balapulang

Ciri-ciri dari perkembangan wilayah adalah:

- Jumlah penduduk cukup banyak
- Mempunyai sarana dan prasarana yang baik
- Mempunyai fasilitas-fasilitas yang strategis
- Mempunyai prospek pengembangan yang baik

3.2.2. Kondisi Kabupaten Dati II Tegal

Secara umum kondisi Kabupaten Dati II Tegal dapat di jelaskan sebagai berikut:

3.2.2.1. Jumlah dan perkembangan penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Dati II Tegal pada akhir tahun 1990 adalah sebesar 1.239,351 jiwa dengan tingkat pertumbuhan nyata rata-rata sepuluh tahun terakhir sebesar 1.20%. Luas wilayah Kabupaten yaitu seluas 87.878,554 Ha dan luas daera terbangun 13.342,682 Ha, maka kepadatan brutto rata-rata 14,10 jiwa/Ha, dan kepadatan netto rata-rata 92,89 jiwa/Ha.

3.2.2.2. Pembangunan

Arah dan tujuan pembangunan di Kabupaten Dati II Tegal merupakan penjabaran atau penyesuaian dari arah dan tujuan pembangunan jangka panjang di Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Sesuai dengan pelaksanaan pembangunan kota Slawi yang harus merupakan penerapan dan pelengkap dengan pelaksanaan pembangunan tingkat yang lebih tinggi, maka pembangunan kota Slawi sesuai dengan prioritas dalam sektor-sektor

Semua sektor yang menjadi prioritas pembangunan tersebut kebijaksanaan-kebijaksanaannya terpecah keseluruh Wilayah Kabupaten Dati II Tegal.

3.2.2.3. Sub Wilayah Pembangunan (SWP)

Dengan memperhatikan perkembangan dan tingkat keeratatan hubungan antara kegiatan yang ada, yang pada pengembangan sumber daya alam dan manusia, dan dengan tetap mempertimbangkan sumber kemampuan dalam segala hal termasuk swadaya masyarakat, maka kebijaksanaan perwilayahan pembangunan Kabupaten Dati II Tegal, terdiri dari beberapa sub wilayah pembangunan (SWP), yaitu : 9)

1. Sub Wilayah Pembangunan I, meliputi wilayah kerja

Pembantu Bupati Tegal Wilayah Tegal, yaitu Kecamatan dengan pusat pengembangannya di Suradadi.

Potensi utama wilayah ini adalah industri perikanan laut dan air payau, serta pariwisata. Potensi lain yang dapat dikembangkan adalah pertanian tanaman pangan, peternakan dan perdagangan.

2. Sub Wilayah Pembangunan II, meliputi wilayah kerja

Pembantu Bupati Tegal Wilayah Slawi, Pangkah dan A diwarna, dengan pusat pengembangannya di Slawi. Potensi wilayah utama wilayah ini adalah Pemerintahan, perdagangan, pendidikan, industri kecil dan pertanian tanaman pangan. Potensi lain yang dapat dikembangkan

9) Rencana, Proyek RTRW Kabupaten Dati II Tegal, Bab III.25

1,26% pertahun, angka ini terhitung sangat rendah bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk nasional yang 2,34% pertahun¹⁰⁾. Untuk lebih lengkapnya proyeksi penduduk kota Slawi dari tahun 1989 sampai tahun 2009 dapat dilihat pada dibawah ini.

TABEL 3.1
PROYEKSI PENDUDUK DI TIAP KELURAHAN/DESA KOTA SLAWI
DAN WILAYAH PENGEMBANGAN TAHUN 1989-2009

No.	Kelurahan/Desa	Jumlah Penduduk (jiwa)				
		1989	1994	1999	2004	2009
1.	Kalisapu	7.400	7.780	8.160	8.540	8.920
2.	Pakembaran	8.423	8.963	9.503	10.043	10.583
3.	Trayeman	2.966	3.626	4.286	4.946	5.606
4.	Kudaili	4.697	5.027	5.357	5.687	6.017
5.	P r o c o t	4.400	4.950	5.420	5.890	6.360
6.	K a g o k	3.880	3.935	3.990	4.045	4.100
7.	Slawi Wetan	9.200	9.620	10.040	10.460	10.880
8.	Slawi Kulon	8.914	9.159	9.404	9.649	9.894
9.	Dukuh Salam	4.489	4.744	4.999	5.254	5.509
10.	Dukuh Wringin	4.698	4.728	4.758	4.788	4.818
Kota Slawi		58.737	62.322	65.907	69.492	73.077
11.	Pondawa	3.720	3.940	4.160	4.380	4.600
12.	Jatimulya	4.240	4.300	4.360	4.420	4.480
13.	Tegalandong	4.770	4.815	4.860	4.905	4.950
14.	Kebunan	4.194	4.229	4.264	4.299	4.334
15.	Pelagangan	3.666	4.031	4.396	4.761	5.126
16.	Dukuhsembung	2.156	2.306	2.456	2.606	2.756
17.	Penusupan	6.472	6.912	7.352	7.792	8.232
18.	Kendalberut	5.585	6.290	6.995	7.700	8.405
Wilayah Pengembangan		34.776	36.776	38.776	40.776	42.776
Kota Slawi dan Wila- yah Pengembangan		93.513	99.098	104.683	110.268	115.853

Sumber : Buku Analisa Data RUPK/RDTRK Slawi 1987-2009

Gambar : 3.1. Tabel proyeksi penduduk Kota Slawi.

3.3.4. Kebutuhan Pengembangan Fasilitas Sosial Dan Ekonomi

Pengadaan fasilitas sosial ekonomi ditujukan untuk dapat menunjang kegiatan penduduknya untuk melihat dan mengetahui kebutuhan pengembangan fasilitas kota Slawi

10) Sumber: Buku Analisa Data kependudukan Kota Slawi, 1987 -2009 Hal II.14

dimasa mendatang, hal ini didasarkan atas beberapa pertimbangan yang antara lain adalah : 11)

1. jumlah dan keadaan penduduk yang akan dilayani pada masa mendatang
2. kapasitas pelayanan fasilitas yang di dalamnya termasuk jangkauan pelayanan fasilitas.
3. keadaan fasilitas saat ini (existing) yang meliputi jenis, kualitas dan lokasi fasilitasnya.

Berdasarkan ketiga pertimbangan di atas, maka dapat ditentukan jumlah fasilitas yang harus tersedia serta kebutuhan pengembangan dari fasilitasnya. keadaan fasilitas saat ini perlu dilihat, hal ini merupakan bahan pertimbangan bagi pengelolaan pengembangan fasilitas selanjutnya, mengingat bahwa fasilitas yang telah ada pada saat ini tetap akan dimanfaatkan walaupun diperlukan peningkatan kualitas atau pengembangan ruang. Dengan diperhitungkannya keadaan fasilitas existing di atas, kebutuhan pengembangan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan penduduk dimasa mendatang.

Besarnya kebutuhan pengembangan pengembangan fasilitas sosial ekonomi di kota Slawi untuk tahun 1994-2009 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

11) Sumber : Hasil Perhitungan RUTRK/RTDRK Slawi, Bab III.46

tersebut ditetapkan berdasarkan jenis kegiatan yang dominan dan mempunyai skala pelayanan kota dan regional. Dimana diharapkan adanya kegiatan-kegiatan tersebut dapat memacu pengembangan dan pembangunan sektor-sektor lainnya di BWK yang bersangkutan.

Dari pertimbangan-pertimbangan di atas tersebut penetapan dari fungsi setiap BWK adalah sebagai berikut :

1. BWK A : Pusat kota

Fungsi utama BWK ini ditentukan sebagai pusat kota atau pusat kegiatan perniagaan (CNB) yang mempunyai skala pelayanan sampai tingkat regional/kabupaten. Luas wilayah pengembangan BWK A $\pm 266,38$ Ha. Jenis komoditi yang diperdagangkan mencakup batrangan primer sampai tertier. Sebagai kawasan kegiatan perdagangan dan jasa, terutama didalamnya kereta api, pasar, pusat pertokoan, jasa bank, asuransi, hotel, bioskop. Fungsi lainnya yang cukup dominan adalah kawasan perumahan dengan kepadatan tinggi.

2. BWK B : Pusat Pemerintahan dan Pelayanan Sosial

Luas wilayah pengembangan /BWK B ini $\pm 450,62$ Ha dengan penggunaan utama kegiatan perkantoran pemerintahan, rumah sakit wilayah, kawasan kemiliteran dan kawasan perumahan. Bagian wilayah kota ini ditetapkan berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan kesehatan. selain itu di BWK B ini dikembangkan sebagai kawasan perumahan dengan kepadatan

12) RTURK Kota Slawi, 1987 - 2009, Bab IV.3.

tinggi sampai sedang.

3. BWK C : Kawasan Perumahan Padat

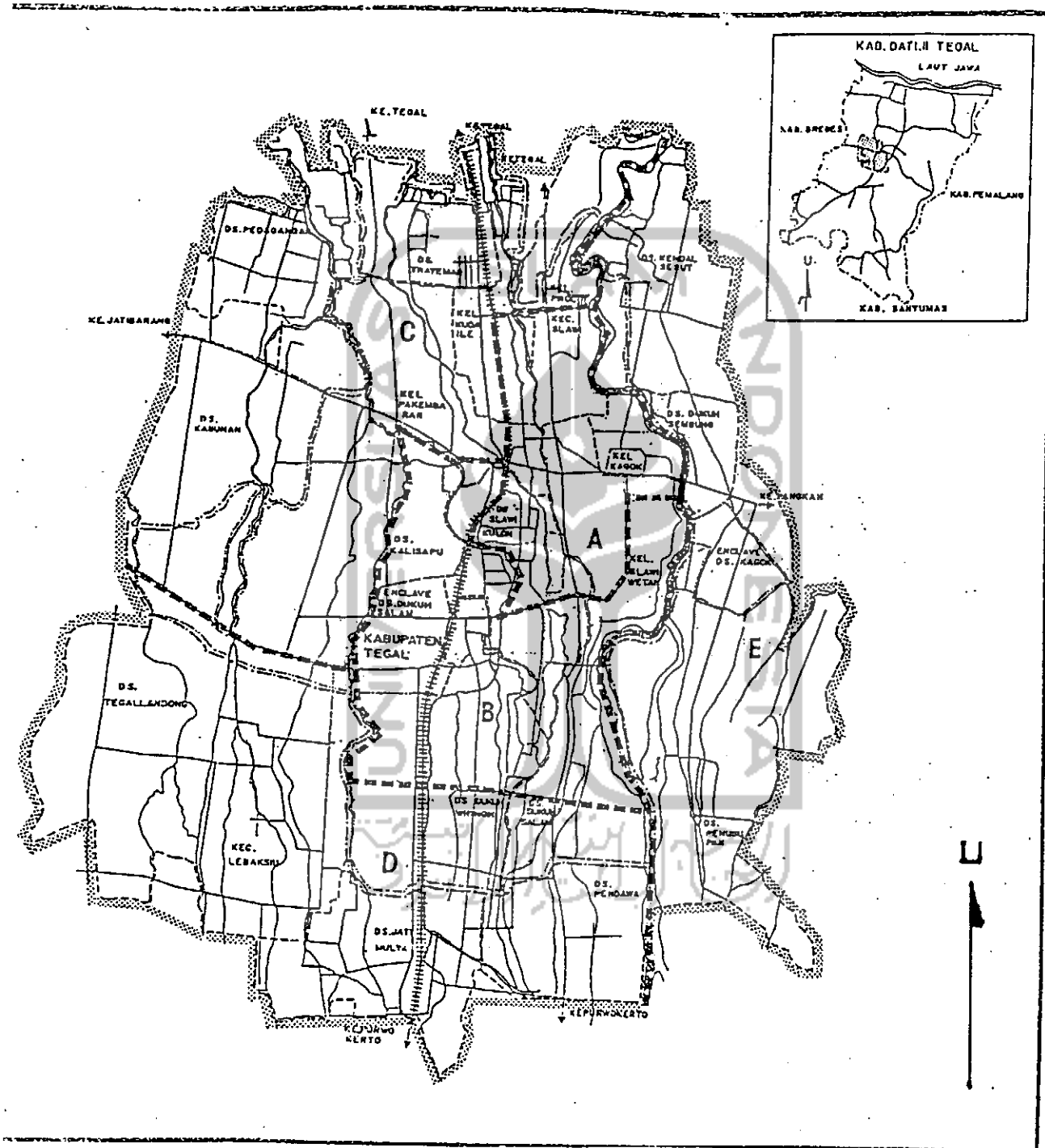
Penggunaan utama di wilayah ini adalah kegiatan perumahan, kegiatan pendidikan menengah dan atas, serta lahan pertanian. Luas wilayah pengembangan/BWK C ini +958,45 Ha. BWK C ini ditetapkan berfungsi sebagai pusat kegiatan olah raga dan kebudayaan, serta pendidikan menengah dan atas. Kegiatan lainnya adalah sebagai kawasan pengembangan perumahan dengan kepadatan tinggi sampai kepadatan sedang.

4. BWK D : Kawasan Perumahan Pinggiran

Di BWK ini, penggunaan lahannya didominir oleh kegiatan perumahan dengan lahan pertanian, dan dilengkapi juga dengan sarana perdagangan/pasar mingguan dengan skala lokal/lingkungan. Luas wilayah pengembangan/BWK ini adalah +986,32 Ha. BWK D ini ditetapkan berfungsi sebagai kawasan pusat pengembangan pendidikan tinggi. Fungsi lainnya adalah pengembangan kawasan perumahan dengan kepadatan tinggi sampai rendah, dan pengembangan kegiatan pelayanan transportasi regional, serta kawasan cadangan pengembangan yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian.

5. BWK E : Kawasan Industri

Fungsi utama BWK E ini diarahkan sebagai kawasan pengembangan industri. fungsi lainnya ditetapkan sebagai kawasan pengembangan perumahan dan kawasan pekuburan, serta kawasan cadangan pengembangan. Luas wilayah pengembangan/BWK E ini adalah +597,82 Ha.



Gambar : 3.4. Pembagian Bagian wilayah Kota
(BWG) Kota Slawi.

Ikhtisar

Kota dapat dipandang sebagai organisme hidup yang terdiri atas berbagai unsur pembentuknya yaitu penduduk dan berbagai kegiatan sosial ekonominya, serta sistim dan jaringan fasilitas-utilitas penunjang kegiatan-kegiatan diatas dari waktu ke waktu, unsur-unsur pembentuk kota tersebut mempunyai sifat yang dinamis, terutama yang disebabkan karena adanya perkembangan dan penambahan penduduk kota yang bersangkutan. Perkembangan dan pertumbuhan penduduk tidak hanya secara kuantitas melainkan juga meliputi segi kualitasnya. Oleh karena itu perkembangan dan pertumbuhan penduduk tersebut senantiasa diikuti oleh peningkatan berbagai kebutuhan, baik yang berasal dari peningkatan kesejahteraan penduduknya maupun kepentingan-kepentingan pemerintah kota untuk memperbesar status, fungsi dan peran kota selaras dengan kontribusi kota fsecara regional.

Perkembangan dan pertumbuhan kota dapat berjalan dengan sendirinya tanpa adanya upaya tertentu untuk mengendalikan dan mengarahkannya. Dalam kenyataan itu, perkembangannya hanya akan mengikuti kecenderungan pemanfaatan potensi-potensi yang telah ada dan di kembangkan sebelumnya. Mekanisme perkembangan seperti itu senantiasa tidak dapat mengatasi masalah-masalah kota yang muncul belakangan akibat meningkatnya ragam dan kompleksitas kebutuhan serta sistem kegiatan kotanya.

Melihat kemungkinan-kemungkinan di atas, upaya untuk menata, mengarahkan dan mengendalikan perkembangan dan pertumbuhan kota perlu diselenggarakan sedini mungkin. Dengan demikian keserasian dan keseimbangan antara kebutuhan-kebutuhan kota dengan pemanfaatan potensi-potensi yang telah ada dapat diselaraskan karena pengelolaan sistem kegiatan kota berjalan efisien dan efektif. Bahkan dapat dipengaruhi pula tujuan-tujuan untuk meningkatkan keragaman untuk kegiatan kota mengejar peningkatan kepentingan pemerintah kota dan kebutuhan masyarakat kota beserta masyarakat daerah belakangnya (regional).

Kenyataan pada saat ini, kota Slawi telah berkembang pesat dengan ciri dan sifat kehidupan masyarakat kotanya yang khas. Disamping terlihatnya peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, dapat disaksikan pula bahwa perkembangan dan pertumbuhan kota tersebut membawa berbagai masalah tertentu dalam kaitannya dengan pemanfaatan potensi-potensi kotannya. Masalah-masalah yang dirasa cukup penting menyangkut perencanaan kota Slawi adalah :

- a. Terpilihnya kota Slawi sebagai Ibukota kabupaten Dati II Tegal, akan membawa akibat meningkatnya kegiatan-kegiatan yang dipusatkan dikota Slawi, baik kegiatan pemerintahan maupun kegiatan sosial ekonomi.
- b. Struktur ruang kota belum terjalin baik dan tertata secara kompak. Banyak lahan-lahan yang cukup potensial tetapi masih kosong/belum dimanfaatkan.

BAB IV

ANALISA PENDEKATAN PERENCANAAN DAN PERANCANGAN

4.1. Analisa Eksternal

4.4.1.1. Analisa Pemilihan Lokasi/site

Untuk menentukan lokasi pembangunan Kantor Kabupaten Dati II Tegal, yang menjadi dasar pertimbangan adalah:

- a. Aspek strategis, Yaitu mudah dijangkau dari setiap bagian wilayah kota; merupakan lokasi yang strategis dari sudut pandang yang luas dan memiliki nilai estetika yang tinggi
- b. Aspek Teknis, Yaitu di dalam kaitannya dengan pembangunan perkotaan, hal ini diusahakan agar lokasi terpilih benar-benar dapat menampung perkembangan pemukiman perkotaan sampai jangka waktu panjang
- c. Aspek Administratif, dalam menentukan lokasi mempertimbangkan terhadap kedekatan hubungan terhadap area fungsional Pemerintah/fungsi instansional lainnya.

4.2.1. Penentuan Lokasi

Lokasi/site yang terpilih berdasarkan pada pertimbangan mengenai tujuan perencanaan dan perancangan bangunan Kantor Kantor Kabupaten, maka lokasi Kantor Kabupaten di Kota Slawi telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Persyaratan Lokasi

- Kesesuaian dengan master plan
- Kemudahan dalam pencapaian
- Kedekatan dengan area fungsional Pemerintah

b. Persyaratan Site

- Kemudahan dan kejelasan pencapaian
- Tingkat gangguan suara/nois
- Tata letak site mendukung penampilan bangunan
- Terpenuhinya persyaratan lingkungan dalam site, yang meliputi:

- Jaringan utilitas
- Kondisi Topografi
- Luasan site memungkinkan

c. Kriteria Pemilihan Site

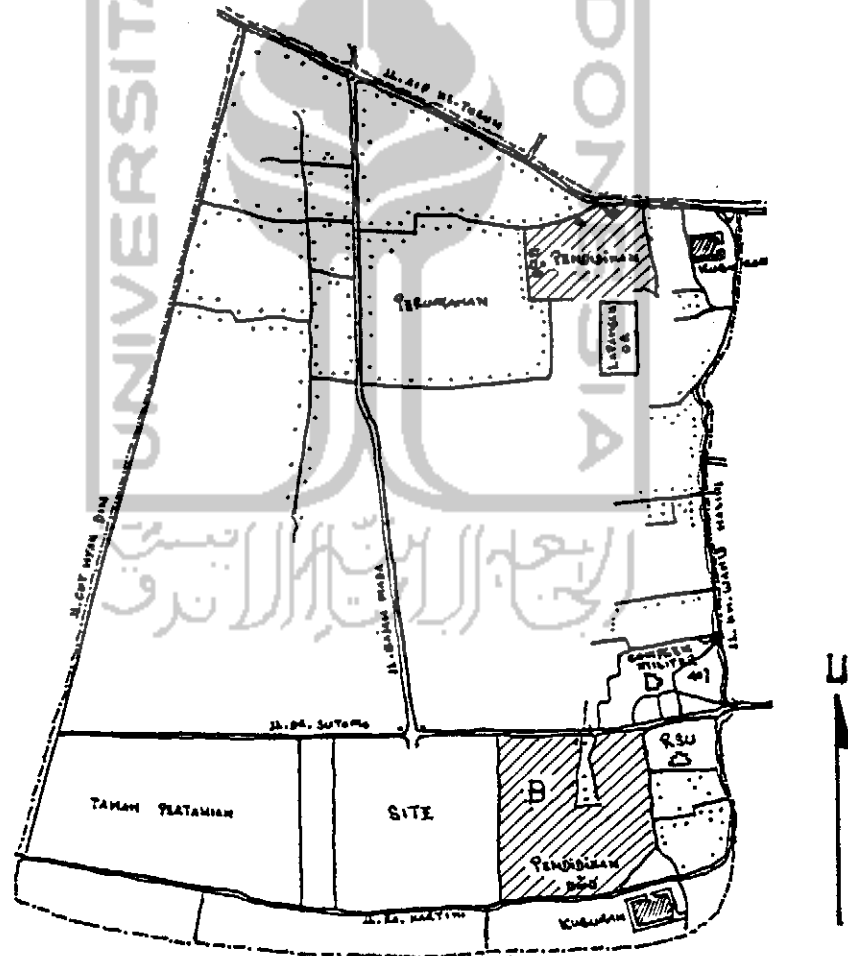
a. Status tanah

status tanah dipertimbangkan dalam pemilihan alternatif lokasi, mengingat bahwa pembangunan suatu ibukota akan lebih mudah dilakukan apabila tanah yang tersedia adalah Tanah Milik Negara, sehingga tidak diperlukan lagi pembebasan tanah yang biasanya memerlukan

mempunyai hubungan kerja yang sangat erat dalam operasionalnya dianjurkan untuk dikonsentrasikan menjadi satu kompleks perkantoran yang kompak dan harmonis.

Lokasi yang dianjurkan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : lokasinya strategis, dan mudah dijangkau dari setiap bagian wilayah kota, merupakan lokasi yang strategis dari sudut pandang yang luas dan memiliki nilai estetik yang tinggi.

Peta B



Gambar : Peta B pembagian ruang komponen Kota Slawi.

B. Fasilitas pendidikan

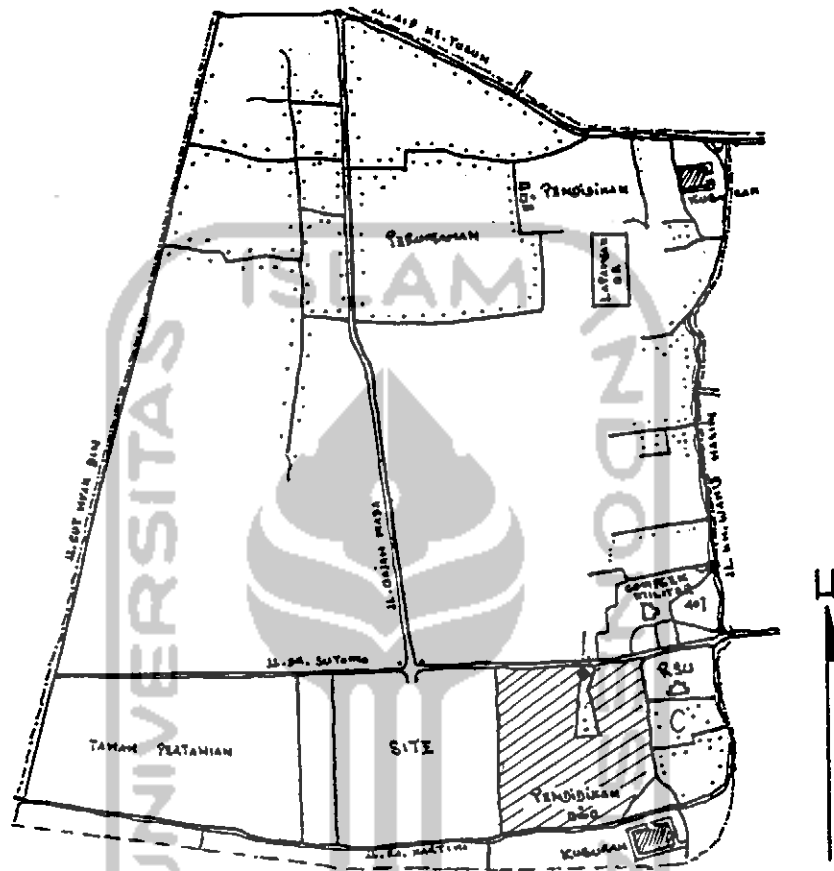
- Fungsi

Merupakan kegiatan peningkatan kemampuan sumber daya manusia agar lebih trampil pada berbagai bidang keilmuan baik yang bersifat teoritis, maupun praktis, serta moral dan etika untuk mewujudkan manusia seutuhnya, terdiri dari Taman kanak-kanak, Pendidikan dasar, Pendidikan menengah pertama, Menengah atas, Akademi dan Perguruan tinggi.

- Orientasi lokasi

- Untuk Taman kanak-kanak dan Pendidikan dasar lokasinya tersebar di setiap bagian kota dan merupakan unit lingkungan perumahan.
- Untuk Pendidikan menengah pertama dan menengah atas lokasinya menyebarkan segenap bagian wilayah kota.
- Akademi dan Perguruan tinggi, memerlukan lokasi yang luas dan merupakan komplek sekolah dari berbagai bidang kejuruan beserta perlengkapannya, lokasi diusahakan dipinggir jalan arteri.

Peta C



Gambar : 4.3. Peta pembagian ruang komponen Kota Slawi.

C. Fasilitas kesehatan

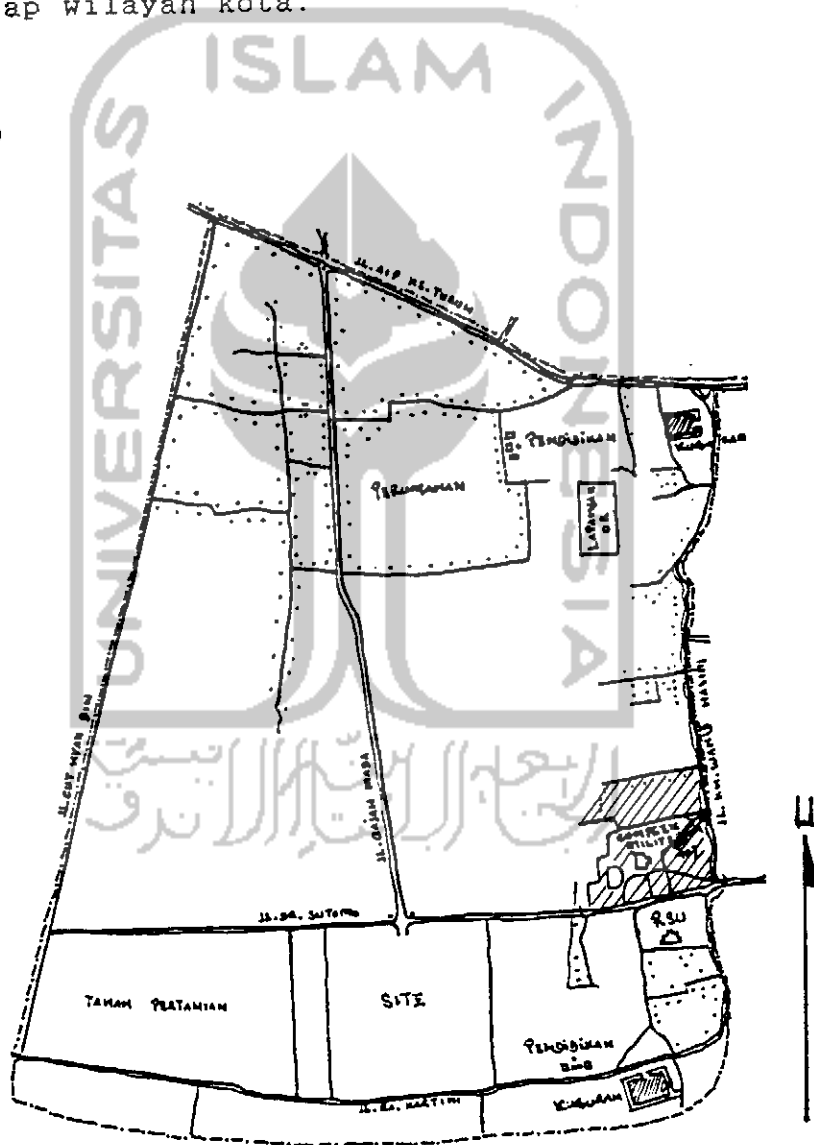
- Fungsi

Merupakan kegiatan pengobatan baik untuk pasien berobat "jalan" maupun yang melakukan perawatan intensif (opname). Terdiri dari berbagai jenis skala pelayanan yaitu : Puskesmas, Poliklinik, Rumah sakit.

Orientasi lokasi

- Untuk Rumah sakit umum lokasi berada di bagian kota yang berudara bersih, sejuk dan tenang serta mudah dijangkau melalui kendaraan umum.
- Puskesmas dan Poliklinik lokasinya terletak di setiap wilayah kota.

Peta D



Gambar : 4.4. Peta D pembagian ruang komponen Kota Slawi.

D. Fasilitas Keamanan

- Fungsi

Menyelenggarakan keamanan dan ketentraman bagi penduduk maupun kepentingan nasional dari segala macam rintangan baik dari luar maupun dalam.

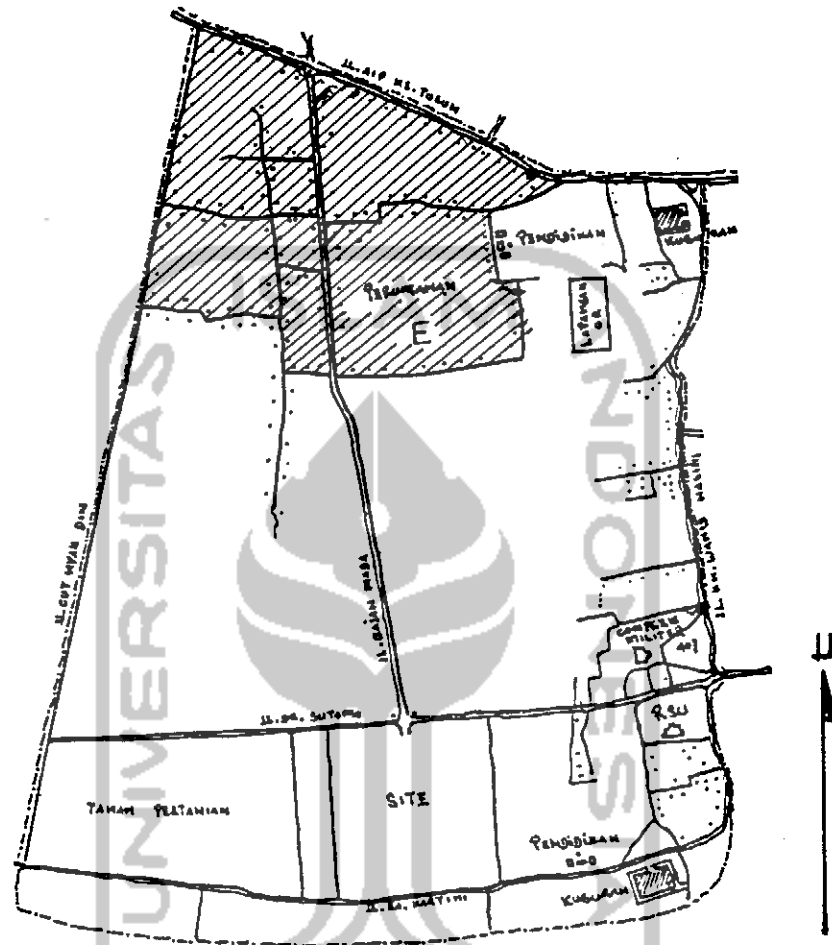
Unsur-unsur yang terlibat di dalamnya adalah AD, AL, AU, POLRI dan ditunjang oleh unsur-unsur sipil lainnya sebagai pendukung sistem pertahanan keamanan rakyat semesta.

- Orientasi lokasi

Lokasi Kepolisian berada di lingkungan kota untuk angkutan lainnya orientasi lokasi berada di pinggiran lingkungan kota.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
الرَّجَاءُ الْإِسْلَامِيُّ الْإِسْلَامِيُّ

Peta E



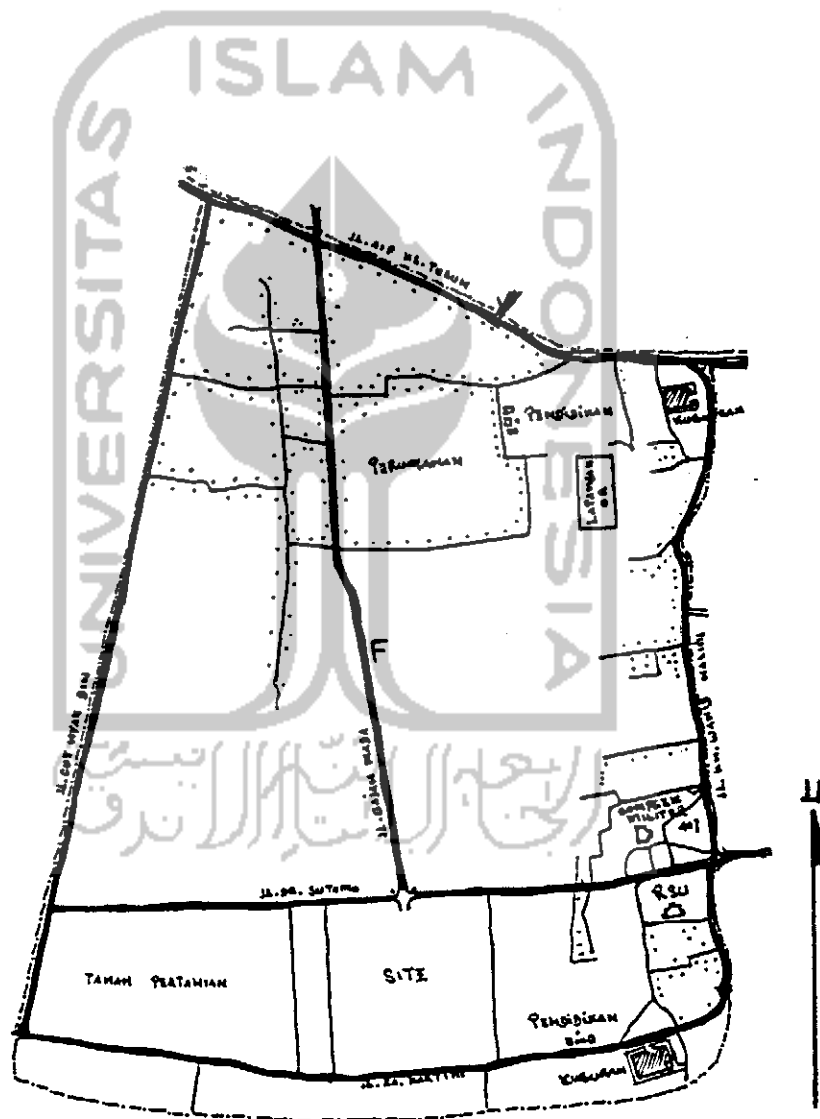
Gambar : 4.5. Peta E pembagian ruang komponen Kota Slawi.

E. Perumahan

Merupakan bagian terbesar dari areal kota dan merupakan sarana hunian yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Lokasinya tersebar di segenap bagian wilayah kota. Pada lokasi-lokasi yang mempunyai nilai tanah tinggi untuk lingkungan perumahan yang memadai dan memenuhi

syarat/standar lingkungan yang memadai, antara lain mempunyai karakteristik : tingkat kemudahan hubungan yang tinggi ke segenap bagian kota; memenuhi syarat-syarat kesehatan, tidak tercemar, tersedia fasilitas dan utilitas lokal yang lengkap.

Peta F



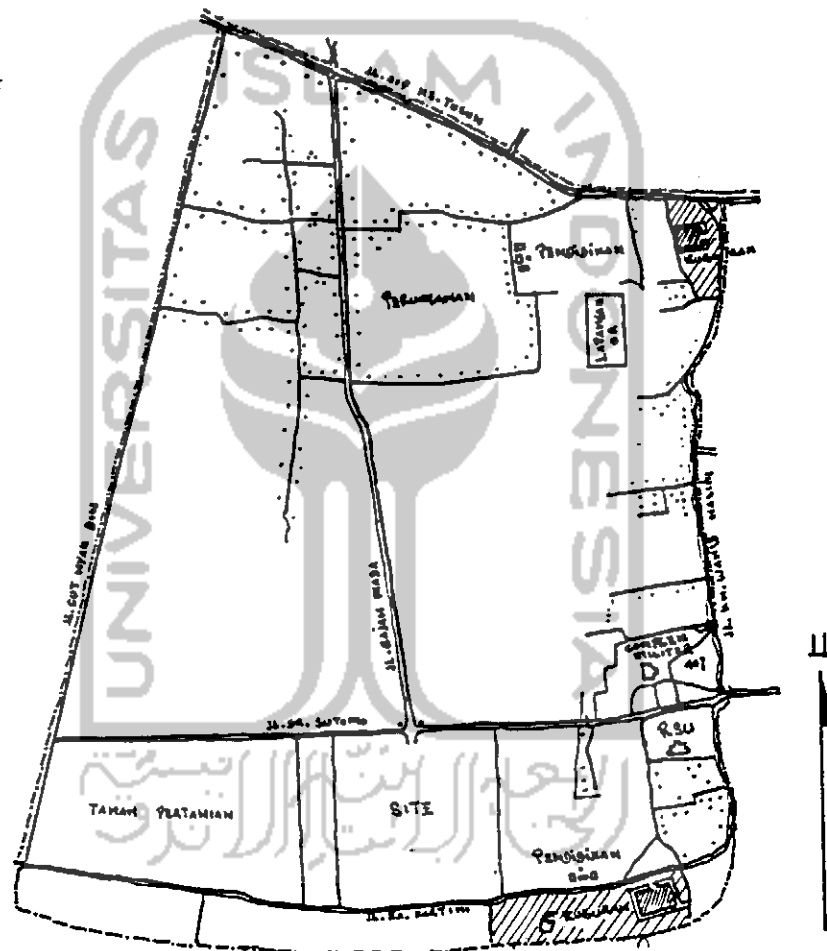
Gambar : 4.6. Pembagian ruang komponen Kota Slawi.

F. Jalan Arteri

Jalan raya yang menghubungkan bagian wilayah kota yang satu dengan lainnya dan menampung arus lalu lintas yang melakukan perjalanan dari setiap bagian wilayah kota.

lokasi : Menyebar menembus setiap bagian wilayah kota.

Peta G



Gambar : 4.7. Peta G Pembagian ruang Komponen Kota Slawi.

G. Kuburan

Tempat pemakaman bagi warga kota yang meninggal, serta berfungsi sebagai jalur hijau. Lokasinya berada jauh dari kota untuk menghindari polusi air dan udara.

4.3. Pengolahan Tapak yang Mendukung Citra Pusat Pemerintahan

Wilayah pengembangan di Pusat perencanaan yang diharapkan dapat menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan kota dan menjadi titik orientasi warganya, didalam perencanaan harus mempertimbangkan faktor eksternal dan internal.

Pertimbangan faktor eksternal dilakukan agar dalam pengembangan kawasan tersebut tidak terdapat pengaruh buruk kepada wilayah sekitarnya, terutama dalam memberi identitas Politis Kabupaten Dati II Tegal. Secara eksternal, lokasi pusat pemerintahan harus dipilih pada posisi yang strategis, yang dalam pengembangannya tidak lepas dari keterkaitan dengan wilayah lain.

Secara Internal, lokasi Kantor Kabupaten dipilih dengan pertimbangan potensi-potensinya yang menonjol sebagai Pusat Pemerintahan, terutama dari segi fisik dan lingkungan yang dapat menunjang citra kota.

Menurut Kevin Lynch, Bahwa komponen citra kota adalah identitas, yaitu ciri dari unsur-unsur yang membuat suatu kota menonjol.

Dengan menggunakan dasar teori dari Lynch, dan batasan-batasan yang akan dicapai diatas, perencanaan dan perancangan Kantor Bupati dalam kawasan Pusat Pemerintahan dilakukan melalui penggalian potensi kondisi fisik dan lingkungan, terutama dengan pertimbangan tapak bangunan.

4.3.1. Pemanfaatan Lahan

Kondisi tanah di wilayah perencanaan cukup datar dengan kemiringan 0 - 3 %, dimanfaatkan untuk peletakan Bangunan-bangunan Kantor Kabupaten. Pemanfaatan kontur alam secara alami dipilih untuk digunakan sebagai pengaturan kedudukan/letak sesuai dengan hubungan Tata Kerja Instansi Pemerintah yang erat dalam operasionalnya.

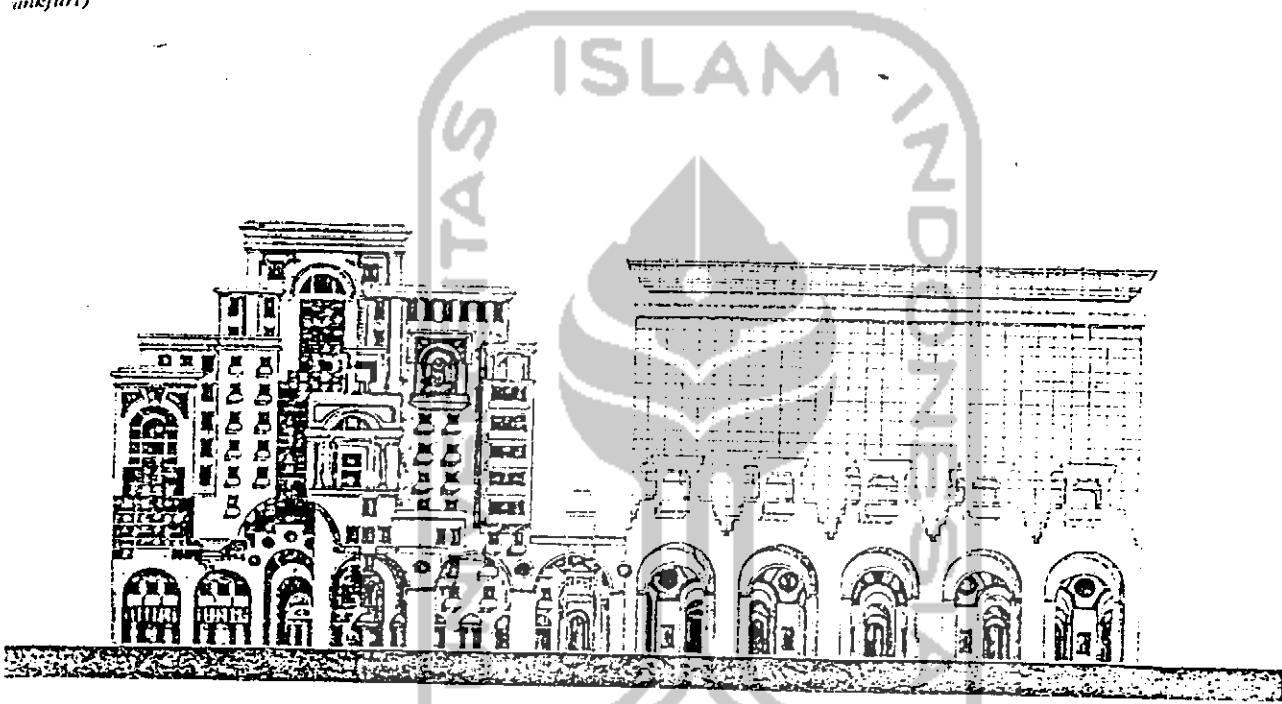
Tetapi secara horizontal, peletakan Kantor Bupati akan mendukung kesan monumental apabila berada di tengah-tengah lahan Pusat Pemerintahan. Dengan keberadannya Kantor Bupati di tengah-tengah lahan dan instansi lain, maka akan sesuai dengan fungsinya sebagai pusat orientasi.

Kejelasan orientasi merupakan bagian dari kesan visual diperlukan untuk menunjang Citra Pusat Pemerintahan. Kejelasan orientasi dan titik sumbu merupakan dua unsur yang saling membentuk, keduanya berkaitan dengan simetrisitas ruang dan masa bangunan, yang mendukung nilai formal Pusat Pemerintahan.

Simetri adalah suatu aspek keseimbangan dalam komponen. Ciri-ciri keseimbangan visual dari bentuk berasal dari: Wujud, Ukuran, Warna, Tekstur, Posisi, Orientasi, Inertia visual yang terlihat dari elemen-elemen dibidang penglihatan (lihat gambar 4.8.)

*levation of Hotel Piazza d'Italia
nd office building
ject, 1985
k and watercolor on paper, 22.5" x 30"
rawing by Arthur Andersson*

*adel
ourtesy Deutsches Architekturmuseum,
ankfurt)*



Gambar 4.8. Ciri-ciri keseimbangan.

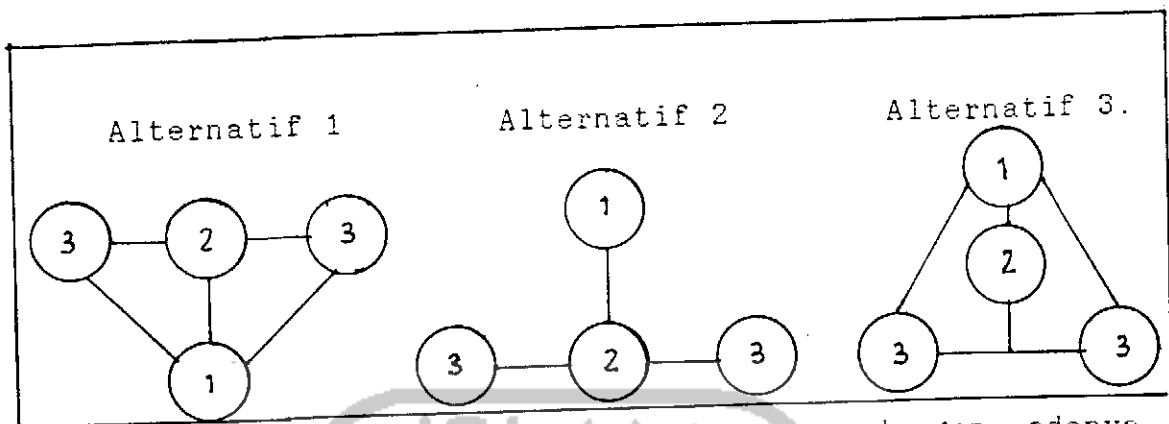
Pada Pusat Pemerintahan ini, titik orientasi merupakan titik pertemuan sumbu yang dibuat. Titik orientasi juga dibentuk dari elemen terhadap satu sama lain secara visual termasuk jaringan transportasi di kawasan Pusat Pemerintahan. Orientasi yang menciptakan simetrisitas akan memberikan kesan resmi, teratur sesuai dengan nilai formal yang harus dipancarkan Pusat Pemerintahan sebagai lembaga tertinggi Negara.

Adanya komponen fungsional kota menjadi Pusat Pemerintahan yang baru, maka akan mendorong munculnya fasilitas pusat kota yang lain di sekitarnya, misalnya Masjid agung, Gedung pertemuan, Gedung olah raga dan Gedung - gedung kesenian, maka kejelasan orientasi dari fasilitas-fasilitas tersebut akan mendukung nilai pemersatu yang menjadi titik orientasi.

Di dalam perencanaan dan perancangan Kantor Kabupaten Dati II Tegal, bangunan dan ruang yang penting diletakan pada garis sumbu, antara lain: Kantor Bupati, Kantor Sekwilda, Pendopo dan lapangan upacara sedangkan fasilitas Pemerintah yang dianggap kurang penting, diletakan diluar garis sumbu, tetapi tetap berorientasi secara simetri. Bangunan yang ditempatkan pada satu sumbu yaitu :

1. Kelompok Ruang Bupati dan Ruang Sekwilda
2. Kelompok Ruang Pertemuan/Pendopo
3. Kelompok Fasilitas Umum.

Ada beberapa alternatif peletakan bangunan Kantor Kabupaten Dati II Tegal yaitu antara lain :



- Alternatif 1 tidak efektif karena dengan adanya kelompok fasilitas umum dibelakang maka privacy ruang Bupati akan terganggu.
- Alternatif 2 kurang efektif bila bangunan pendopo/ ruang pertemuan diletakan ditengah-tengah antara bangunan fasilitas umum karena akan menghambat sistem pelayanan yang saling berhubungan.
- Alternatif 3 cukup efektif karena sudah sesuai dengan hirarki dan sifat pelayanannya, dimana bangunan utama menjadi titik orientasi dari bangunan lainnya.

Berdasarkan alternatif yang ada maka yang terpilih adalah alternatif no. 3 karena sudah sesuai dengan persyaratan sebagai Kantor Pemerintah yang berfungsi sebagai pusat pelayanan kepada masyarakat.

4.4. Organisasi Ruang

Pengelompokan organisasi ruang berdasarkan pada hirarki pelayanannya dapat dibagi menjadi :

- Kelompok Publik

Merupakan ruang-ruang yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

- Kelompok Semi Publik

Merupakan ruang-ruang yang tidak berhubungan langsung dengan masyarakat.

- Kelompok privat

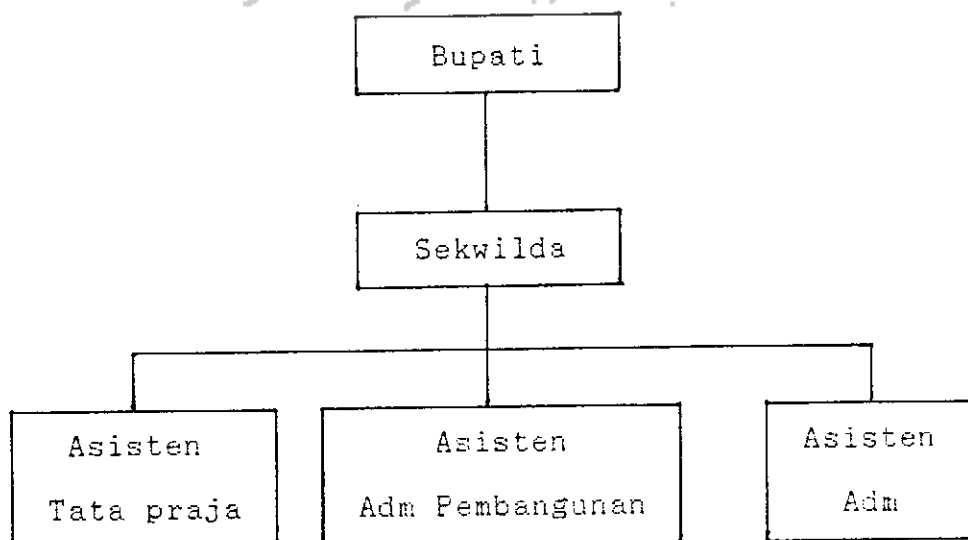
Merupakan ruang-ruang yang digunakan untuk aktifitas intern karyawan, masyarakat tidak berhubungan langsung

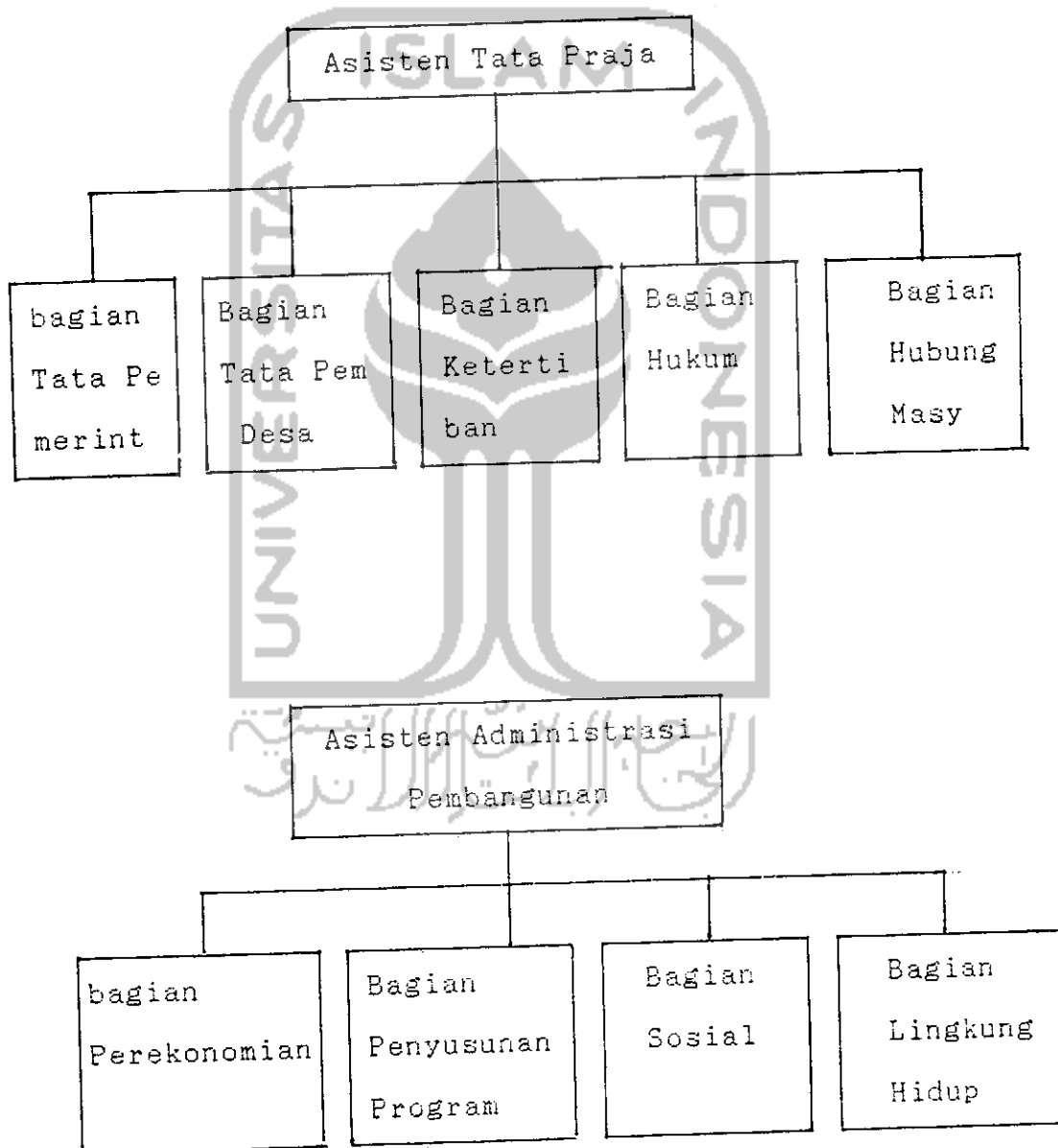
- Kelompok service

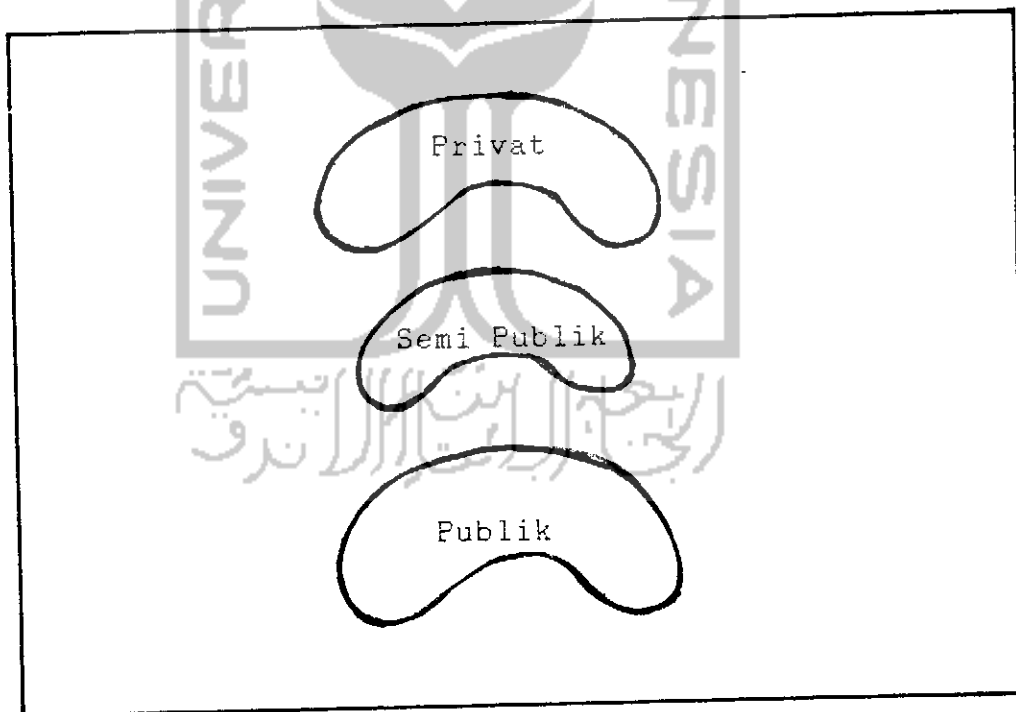
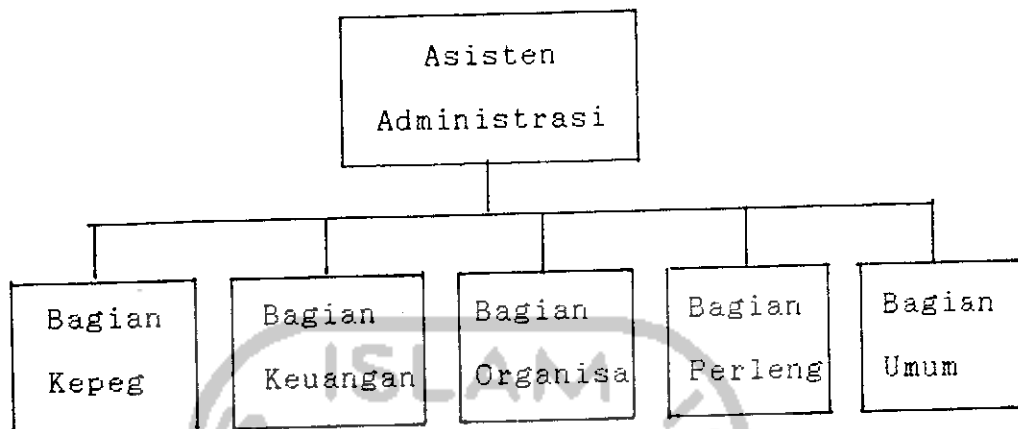
Ruang-ruang yang berfungsi untuk mewadahi kegiatan pendukung operasionalnya atau service

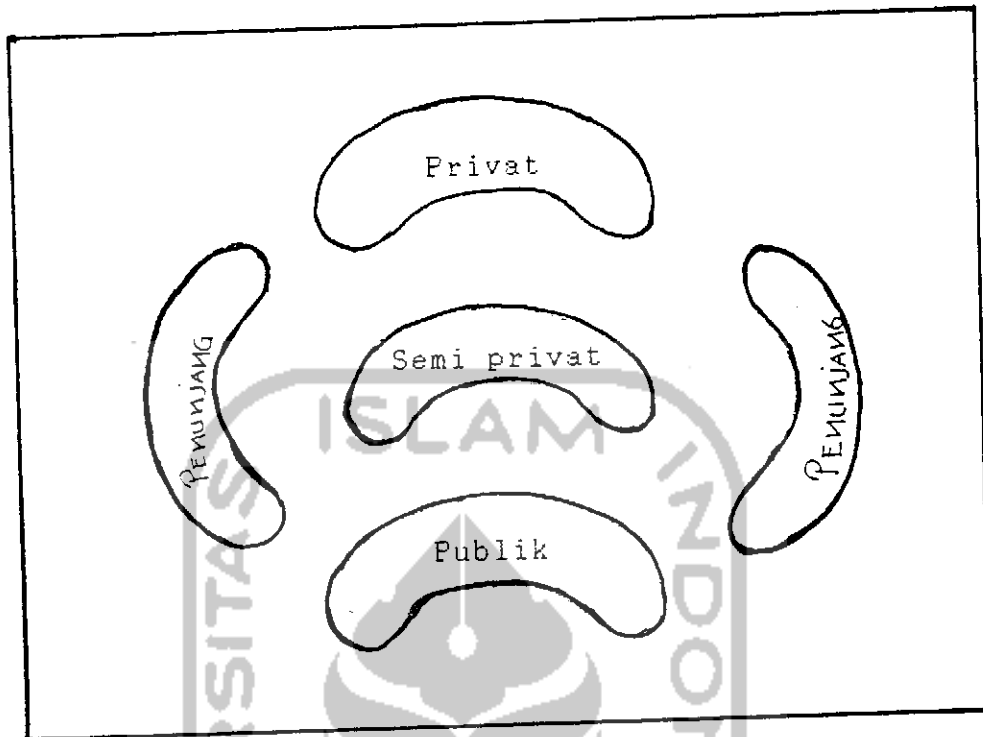
- Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelompokan ruang adalah :

- a. Sifat, bentuk, dan karakteristik kegiatan yang diwadahi
- b. Pengelompokan ruang yang mempertimbangkan pada hirarki pelayanan yang disesuaikan dengan fungsinya sebagai pelayanan kepada masyarakat.









Gambar 4.11 : Pengelompokan tiap unit-unit fungsi

4.5. Analisa Pola Penataan Fungsi Bangunan

Di dalam Kantor Kabupaten Dati II Tegal berdasarkan hirarki jabatan dalam kepemimpinan dan sifat pelayanan terhadap masyarakat, dapat dibagi menjadi tiga kelompok (zonning), yaitu:

- Zonning I : Merupakan fungsi-fungsi legislatif.
- Zonning II : Untuk fungsi-fungsi koordinasi seperti Itwilkab, BP.7, Bappeda.
- Zonning III : Untuk dinas-dinas, Direktorat non Direktorat dan fungsi-fungsi yang bersifat umum lainnya.

Dengan batasan-batasan diatas, perletakkan fungsi bangunan dalam Kompleks Pemerintahan seperti yang tercantum di dalam Struktur Organisasi Pemerintah Dati II Tegal, maka Kantor Bupati diletakan sebagai sentral bangunan-bangunan sekitarnya, kemudian bangunan fungsi lainnya seperti Sospol, Bappeda, BP. 7, Dinas-dinas dan instansi vertikal lainnya diletakan disekitar bangunan Kantor Bupati.

4.6. Analisa Kebutuhan Ruang Bangunan

4.6.1. Internal

4.6.2. Ruang Dalam

Hubungan ruang yang terjadi didalam bangunan Kantor Bupati, diperoleh berdasarkan pada kebutuhan ruang yang di tuntut oleh adanya tata kerja, tata koordinasi, karakteristik kegiatan yang dilakukan, yang meliputi: jumlah kegiatan, jumlah personil, bentuk dan macam serta karakteristik kegiatan kerja yang dilakukan.

Berdasarkan susunan hirarki jabatan Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Dati II Tegal, maka secara garis besar ruang-ruang dapat di kelompokkan sebagai berikut:

a. Kelompok Ruang Bupati ;

- Ruang kerja Bupati
- Ruang tunggu
- Ruang tamu
- Ruang ajudan dan staf

- Ruang-ruang servis dan sirkulasi
- b. Kelompok Ruang Sekretaris Wilayah Daerah :
 - Ruang kerja Sekretaris Wilayah Daerah
 - Ruang rapat
 - Ruang tunggu
 - Ruang tamu
 - Ruang istirahat
 - Ruang service dan sirkulasi
- c. Kelompok Ruang Asisten Sekretariat Bidang Pemerintahan :
 - Ruang asisten sekretaris
 - Ruang staf asisten sekretaris
 - Ruang kepala bagian pemerintahan
 - Ruang kepala sub bagian pemerintahan
 - Ruang administrasi bagian pemerintahan
 - Ruang kepala bagian hukum, organisasi dan tata laksana
 - Ruang kepala sub bagian hukum, organisasi dan tata laksana
 - Ruang administrasi bagian hukum, organisasi dan tata laksana
 - Ruang kepala bagian humas
 - Ruang kepala sub bagian humas
 - Ruang rapat
 - Ruang tunggu
 - Ruang simpan
 - Ruang service dan sirkulasi



d. Kelompok Ruang Asisten Sekretariat Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesra

- Ruang asisten sekretaris bidang ekonomi
- Ruang staf asisten sekretaris bidang pembangunan
- Ruang kepala bagian perekonomian
- Ruang kepala sub bagian perekonomian
- Ruang administrasi bagian perekonomian
- Ruang kepala bagian pembangunan
- Ruang kepala sub bagian pembangunan
- Ruang administrasi bagian pembangunan
- Ruang kepala bagian kesra
- Ruang kepala sub bagian kesra
- Ruang administrasi bagian kesra
- Ruang rapat
- Ruang arsip
- Ruang tunggu
- Ruang simpan
- Ruang-ruang service dan sirkulasi

e. Kelompok Ruang Asisten Sekretaris Bidang Umum :

- Ruang asisten sekretaris bidang umum
- Ruang staf asisten sekretaris bidang umum
- Ruang kepala bagian keuangan
- Ruang kepala sub bagian keuangan
- Ruang administrasi bagian keuangan
- Ruang kepala bagian kepegawaian
- Ruang kepala sub bagian kepegawaian
- Ruang kepala bagian umum dan protokol

- Ruang kepala sub bagian umum dan protokol
- Ruang administrasi bagian umum dan protokol
- Ruang rapat
- Ruang tunggu
- Ruang arsip
- Ruang simpan
- Ruang-ruang service dan sirkulasi

Kecuali kelompok ruang untuk unit kerja Pemerintah daerah, kantor Bupati dengan kepala daerah Tingkat II Tegal dilengkapi dengan gedung pertemuan/pendopo kabupaten. Kelompok-kelompok ruang yang termasuk dalam bangunan gedung pertemuan/pendopo kabupaten ini adalah :

- a. Kelompok Ruang Pertemuan/balai kesenian
 - Hall utama
 - Ruang belakang panggung, pantry, gudang, toilet
 - Ruang-ruang service dan sirkulasi
- b. Kelompok Ruang Fasilitas Umum
 - Gallery
 - Kantin
 - Musholla
 - Koperasi
 - Ruang olah raga
 - Dharma Wanita
 - Ruang-ruang service dan sirkulasi
- c. Kelompok Ruang Fasilitas Penunjang
 - Ruang pola/duta
 - Ruang komputer

- Ruang pusat arsip
- Ruang pers
- Ruang jaga
- Ruang pengemudi
- Ruang cetak
- Ruang perpustakaan
- Ruang service dan sirkulasi

4.6.3. Analisa Besaran Ruang

Untuk memperoleh luas ruangan yang optimal untuk menampung kegiatan-kegiatan setiap unit kerja yang ada maka diperlukan pendekatan besaran ruang yang berdasarkan atas :

- Jenis ruang/fungsi ruang
- Jumlah pemakai
- Jumlah dan dimensi peralatan yang dipakai
- Standart ruang kerja
- Bentuk sistem lay out yang dipakai

4.6.3.1. Bentuk ruang

Guna mencapai suatu bentuk ruang kegiatan yang menghasilkan pekerjaan yang optimal, maka faktor-faktor yang menentukan bentuk ruang adalah :

- Karakteristik pola gerak aktifitas
- Sifat kegiatan yang diwadahi
- Faktor kemudahan pembentukan dan perawatan ruang

4.6.3.2. Alternatif Bentuk Ruang

Ada beberapa alternatif bentuk ruang yang dibuat dalam perencanaan, yaitu :

- Bentuk Lingkaran

Lingkaran adalah sebuah bentuk yang mempunyai pusat orientasi kedalam dan pada umumnya bersifat stabil dengan sendirinya menjadi pusat lingkaran.




- Bentuk Segi Tiga

Bentuk menunjukkan fasilitas. Jika segi tiga terletak pada salah satu sisinya, segi tiga merupakan bentuk yang sangat stabil. Jika diletakan pada salah satu sudutnya, maka dapat juga tampak seimbang dalam tahap yang sangat kritis atau tampak tak stabil.

- Segi Empat/persegi panjang

Segi panjang menunjukkan suatu yang murni dan rasional, merupakan bentuk-bentuk yang statis, netral, dan tidak mempunyai arah, bentuk ini sangat stabil dan dinamis. Bentuk ini dapat dipergunakan oleh semua jenis pekerjaan.

Maka alternatif ruang yang dipergunakan dalam perencanaan dan perancangan Kantor Kabupaten Dati II Tegal adalah lihat tabel disamping.

Alternatif	kriteria			
	fungsional efisien	fleksibe litas	penyesuain lingkungan	putusan
lingkaran 	+	-	-	
persegi panjang 	+	+	+	✓
segi tiga 	+	-	-	

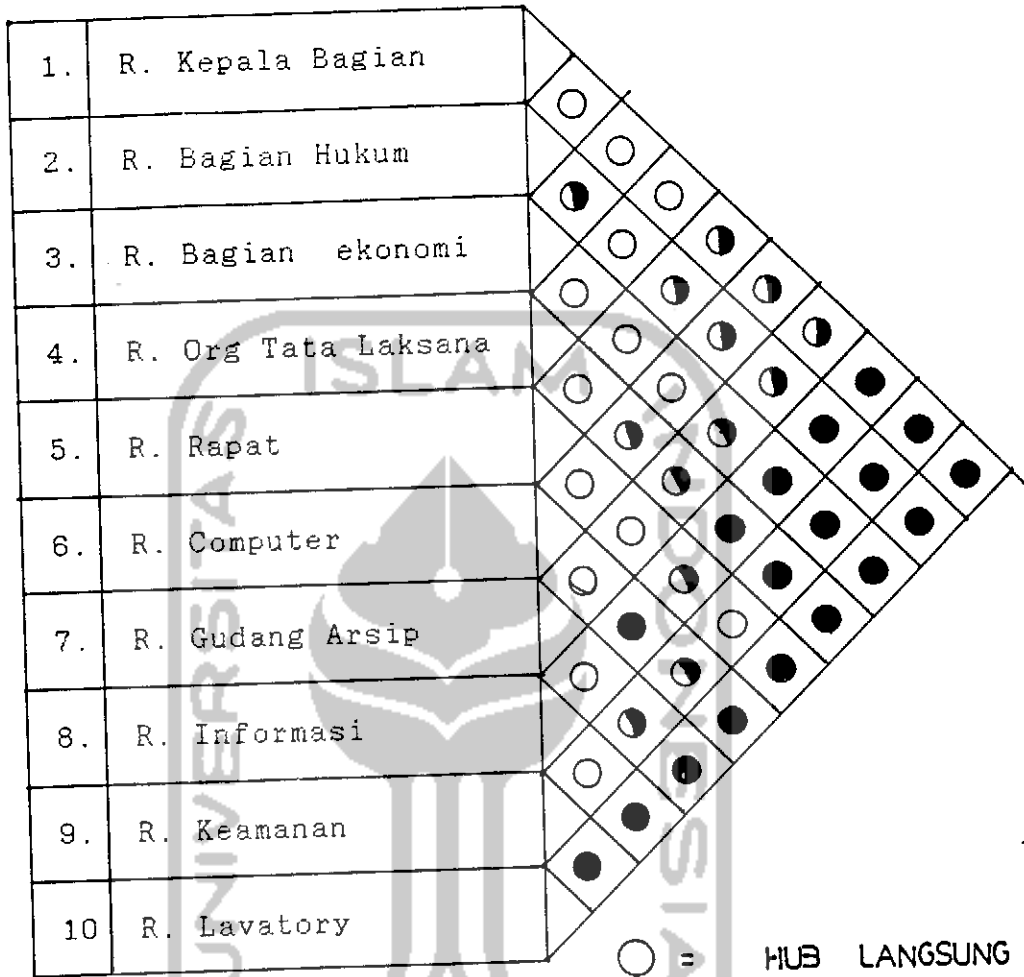
Gambar : 4.1. Tabel alternatif bentuk ruang

4.6.3.3. Hubungan Ruang

Hubungan interaksi antara ruang-ruang yang saling bertautan antara fungsi dan kegiatan berdasarkan dan hirarki kedudukannya.

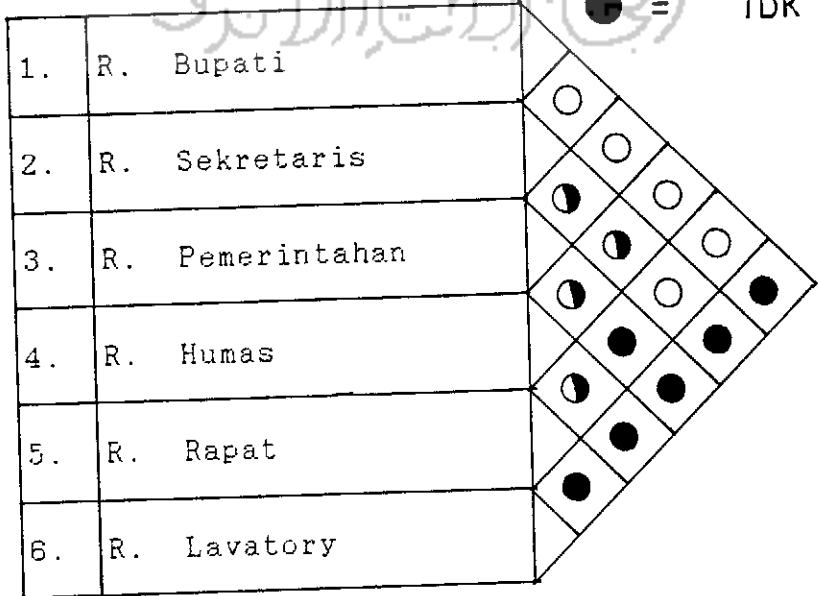
Hubungan ruang yang ada di dalam Kantor Bupati adalah sebagai berikut :

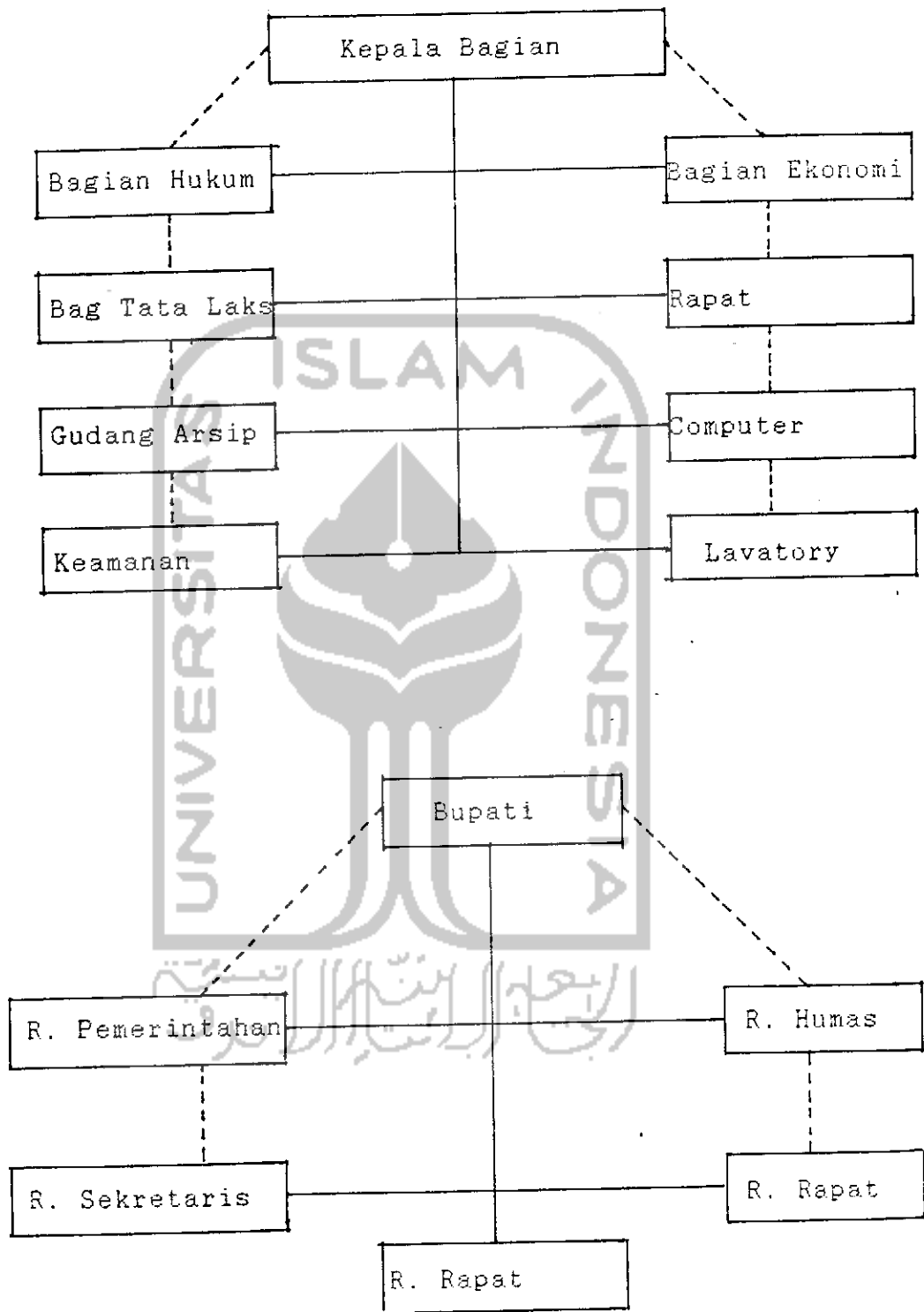
Lt 1.



○ = HUB LANGSUNG
 ◐ = AGAK BERHUBUNGAN
 ● = TDK ——— " ———

Lt II.





Gambar : 4.12. Sistem hubungan ruang

4.6.4. Analisa Tata Ruang Luar

a. Ruang Parkir

Penataan ruang parkir dibuat di beberapa tempat yang berdekatan dengan kelompok bangunan yang setara hirarki fungsionalnya agar dapat memudahkan pencapaian langsung ke bangunan yang dituju.

Perhitungan luas parkir kendaraan dilakukan berdasarkan standart yang berlaku di propinsi Dati I Jawa Tengah. Standart ruang tersebut adalah sebagai berikut :

- Standart bangunan perkantoran : 1 mobil/100 m² luas bangunan
- Luas ruang yang dibutuhkan untuk mobil yang parkir 15 - 23 m²
- Luas parkir untuk kantor Bupati, minimal 600 m²
- Luas ruang parkir untuk pendopo, minimal 390 m²

b. Taman/Tata hijau

Unsur ini diperlukan sebagai pelengkap estetis pada seluruh kompleks Pusat Pemerintahan. Tata hijau dapat dimanfaatkan untuk fungsi-fungsi sebagai berikut :

- Membentuk suasana, yaitu untuk memperkuat kesan formal
- Memberi kesan visual, yaitu untuk memperindah penampilan bangunan juga untuk meredam terhadap kebisingan serta menciptakan suasana ruang dalam yang sehat (pengendalian pengaruh iklim)
- Pelindung, yaitu sebagai pelindung terhadap radiasi panas dan pantulan cahaya.

4.7. Analisa Sistem Sirkulasi

Sistem sirkulasi antara lain mencakup sarana jaringan jalan, sarana angkutan dan perangkat transportasi lainnya. Pada dasarnya sarana dan prasarana jaringan sirkulasi berfungsi untuk melayani kebutuhan pergerakan antara satu wilayah/kawasan lainnya untuk menghubungkan antar berbagai kegiatan atau antar berbagai penggunaan. Mengingat sifatnya sebagai pelayanan pergerakan, maka pola pengaturan jaringan pergerakan harus dapat melayani setiap kawasan baik yang merupakan asal sumber pergerakan (perumahan) maupun tujuan pergerakan (tempat kerja, tempat jasa/fasilitas, tempat hiburan dan tempat-tempat lainnya yang menarik pergerakan).

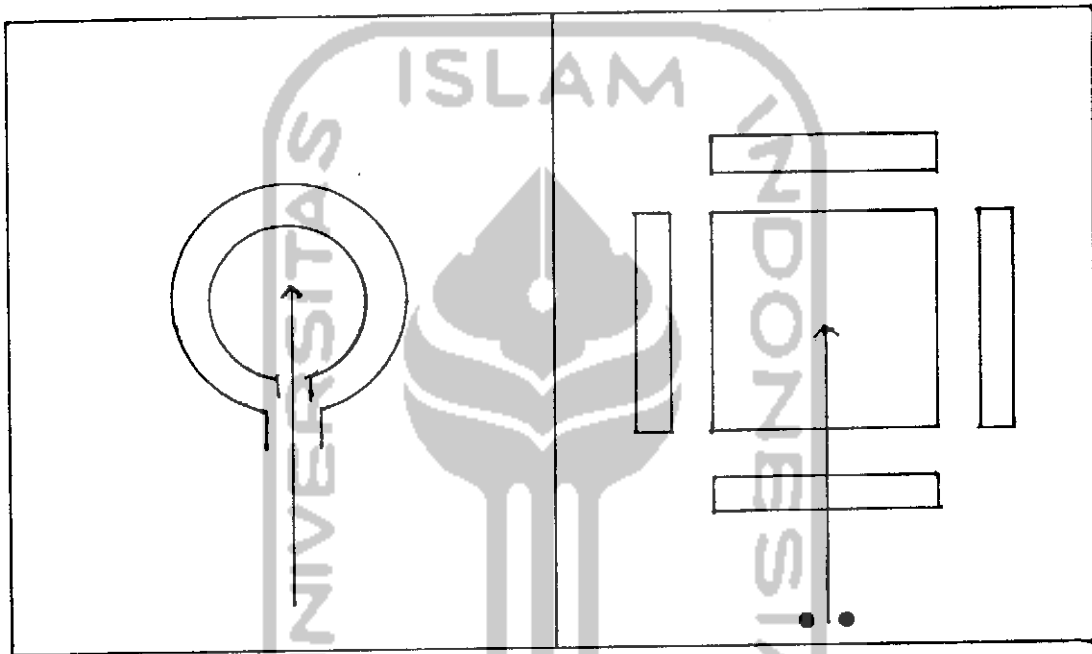
Di dalam perencanaan pola jaringan transportasi ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi yaitu:

- Mudah dicapai
- Mempunyai jarak terpendek antara sumber asal pergerakan dengan tujuan pergerakan
- Mampu menampung arus lalu lintas serta mempunyai kenyamanan dan keamanan bagi pemakai jalan/sarana transportasi.

Dengan demikian diusahakan agar tidak terjadi penumpukan sejumlah pergerakan, hanya pada satu lintas saja, yakni bercampurnya arus lalu lintas (angkutan regional) dengan angkutan lokal.

Selain berdasarkan kriteria-kriteria diatas, sistem pelayanan jaringan transportasi di Pusat Pemerintahan dengan

Dari beberapa alternatif pola sirkulasi yang ada, maka alternatif yang digunakan adalah pola sirkulasi linier, karena memiliki kemungkinan pendekatan dari berbagai arah. Maka penegasan pencapaian diperoleh dari salah satu ruang penunjang.



Gambar 4.13 : Pencapaian masuk kedalam bangunan

4.8. Analisa Bentuk Penampilan Bangunan

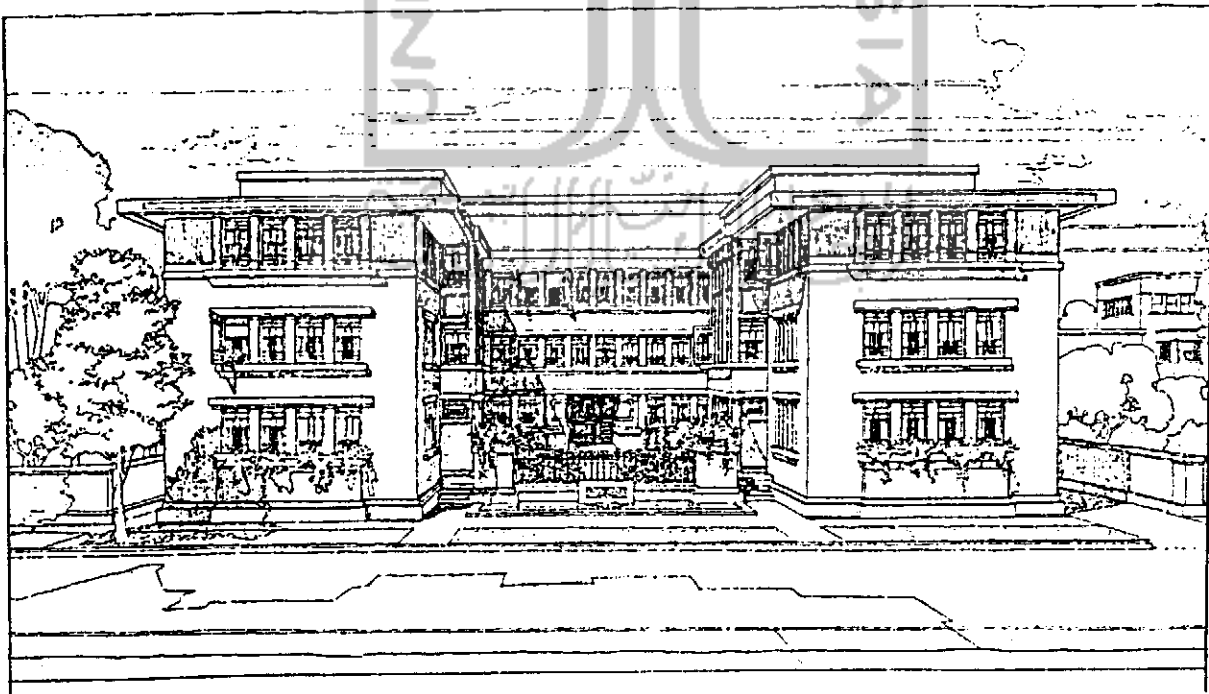
Dalam merencanakan dan merancang penampilan bentuk fisik bangunan Kantor Kabupaten yang sesuai dengan karakteristik kegiatan-kegiatan yang diembanya sebagai lembaga Negara, maka penampilan bentuk bangunannya harus bisa mencerminkan :

- Mencerminkan nilai formalitas yang mencerminkan kedisiplinan dan kewibawaan sebagai perwujudan dari sebuah Perkantoran Pemerintah.

sebagai perwujudan dari sebuah Perkantoran Pemerintah

- Nilai Monumentalitas yang mencerminkan kejelasan keberadaannya sebagai titik pusat dan landmark kotanya, sehingga dapat dibanggakan oleh masyarakat.
- Nilai kesatuan yang mencerminkan setiap bangunan tetap menampilkan hirarki yang sesuai dengan fungsinya.

Prinsip hirarki pada umumnya menunjukkan derajat kepentingan dari bentuk-bentuk dan ruang dan peran-peran fungsional, formal, dan simbolis yang dimainkan didalam organisasinya.



Gambar 4.14 : Sketsa penampilan bangunan.

4.9. Sistem Struktur dan Utilitas

Sistem struktur bangunan merupakan pendukung dalam mewujudkan bentuk bangunan. Pemilihan sistem struktur berdasarkan pada tuntutan dari masing-masing bagian strukturnya adalah :

a. Struktur Atap

Alternatif struktur yang digunakan :

- Struktur rangka atap
- Struktur rangka baja

b. Struktur dinding

Pemilihan struktur dinding berdasarkan pada pertimbangan :

- Mampu menyalurkan beban yang diterima ke pondasi

c. Struktur Pondasi

pertimbangan yang digunakan antara lain :

- Kondisi tanah, Gempa dan faktor-faktor lainnya

Perencanaan fasilitas utilitas pengembangannya diusahakan merata dengan intensitas pelayannya yang disesuaikan kebutuhannya di tiap-tiap bangunan.

Utilitas yang perlu disediakan guna menunjang perencanaan Kantor Kabupaten Dati II Tegal adalah :

- Penyediaan air bersih
- Penyediaan tenaga listrik
- Jaringan rioolering dan drainage kota
- Pembuangan sampah
- Jaringan telephon

Ikhtisar

Perencanaan dan perancangan Kantor Kabupaten sebagai wadah kegiatan pelayanan, baik pelayanan ke dalam maupun pelayanan keluar dituntut untuk dapat memenuhi keinginan masyarakat dengan meningkatkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka untuk meningkatkan segala aktifitas disegala bidang.

Penentuan lokasi Ibukota Kabupaten pada dasarnya adalah juga pemilihan pusat-pusat kegiatan utama dalam wilayah, dengan jangkauan pelayanan regional juga beberapa faktor yang dapat memperlihatkan potensi kota yang dapat memperlihatkan tingkat perkembangan kota yang bersangkutan, yaitu antara lain: Jumlah penduduk, kepadatan penduduk, tingkat perkembangan, fasilitas perdagangan dan intensitas hubungan antar kota. Penggunaan faktor ini didasarkan pada kenyataan tentang adanya hubungan atau korelasi antara besarnya kota (jumlah penduduk) dengan kemampuan atau potensinya untuk berfungsi sebagai pusat wilayah sekitarnya. Artinya, semakin besar kota, semakin besar kemungkinannya untuk menjadi pusat wilayah. Alasan yang dapat dikemukakan antara lain: Suatu kota dengan jumlah penduduk yang besar akan mempunyai fasilitas sosial ekonomi yang sedemikian besar jumlah dan jenisnya, sehingga fasilitas-fasilitas tersebut merupakan daya pelayanan bagi wilayah sekitarnya, juga tingkat konsumsi yang besar sehingga menyerap produksi daerah sekitarnya dalam jumlah yang besar pula, yang berakibat pada terpusatnya aliran barang perdagangan ke kota tersebut

BAB V
KESIMPULAN

**5.1. Perencanaan dan Perancangan Kantor Kabupaten
Dati II Tegal**

5.2. Eksternal

5.2.1. Lokasi \ site

Untuk menentukan lokasi pembangunan Kantor Kabupaten Dati II Tegal yang menjadi dasar pertimbangan :

- a. Aspek Strategis
- b. Aspek Teknis
- c. Aspek Administratif

Lokasi/site yang terpilih berdasarkan pada pertimbangan mengenai tujuan perencanaan dan perancangan bangunan Kantor Kabupaten, maka lokasi Kabupaten yang baru berada di kota Slawi, karena telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Persyaratan lokasi
- b. Persyaratan site

5.2.2. Prinsip Pengolahan Site

untuk mendukung penampilan bangunan Kantor Kabupaten maka prinsip yang digunakan :

- a. Prinsip Koordinasi
- b. Prinsip Formal
- c. Accesibilitas
- d. Integritas

5.3. Internal

5.3.1. Kebutuhan Ruang

Hubungan ruang yang terjadi di dalam bangunan Kantor Kabupaten, diperoleh berdasarkan pada kebutuhan ruang yang dituntut oleh adanya :

- a. Kebutuhan ruang yang dituntut oleh adanya tata kerja, tata koordinasi, karakteristik kegiatan yang meliputi : jumlah kegiatan, jumlah personil, serta karakteristik kegiatan kerja yang dilakukan.

5.3.2. Bentuk Ruang

Untuk mencapai suatu bentuk ruang kegiatan yang menghasilkan pekerjaan yang optimal maka faktor-faktor yang menentukan :

- a. Karakteristik pola gerak aktifitas
- b. Sifat kegiatan yang diwadahi

5.3.3. Tata Ruang Luar

- a. Parkir dan Taman
Perencanaan tempat parkir dan taman dimaksudkan untuk mendukung penataan kawasan, pengguna kendaraan, keamanan dan kenyamanan pejalan kaki agar tercipta suatu kawasan perkantoran yang tertib dan nyaman.

5.3.4. Sistem Sirkulasi

Sistem sirkulasi antara lain mencakup sarana jaringan jalan, sarana angkutan dan perangkat transportasi lainnya.

Di dalam perencanaan pola jaringan transportasi, kriteria yang harus di penuhi adalah :

- a. Mudah dicapai
- b. Mempunyai jarak terpendek antara sumber asal pergerakan dengan tujuan pergerakan
- c. Mampu menampung arus lalu lintas serta mempunyai kenyamanan dan keamanan bagi pemakai jalan\sarana transportasi

5.4. Bentuk Penampilan Bangunan

Dalam merencanakan dan merancang penampilan bentuk fisik bangunan Kantor kabupaten, sesuai dengan karakteristik kegiatan yang diwadahunya sebagai lembaga Negara, maka penampilan bentuk bangunannya harus mencerminkan :

- a. Nilai formalitas
yang mencerminkan kedisiplinan dan wibawa sebagai perwujudan dari sebuah Kantor Kabupaten
- b. Nilai monumentalitas
Yang mencerminkan wibawa dan kejelasan keberadaannya
- c. Nilai kesatuan visual
Yang mencerminkan bangunan tetap menampilkan hirarki yang sesuai dengan fungsinya. Ciri-ciri visual dari bentuk adalah : Wujud, Ukuran, Warna, Tekstur, Posisi, dan orientasi.

BAB VI

KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN

5.1. Konsep Perencanaan Kantor Kabupaten Dati II Tegal

5.1.1. Konsep Pemilihan Lokasi.

Penentuan lokasi Ibukota suatu Kabupaten pada dasarnya adalah juga pemilihan suatu pusat-pusat kegiatan utama dalam wilayah Kabupaten Tegal. Dengan lain perkataan, yang akan ditentukan adalah pusat-pusat wilayah : Pusat wilayah : ini terkandung pengertian jangkauan pelayanan regional. Jadi alternatif-alternatif yang dipilih ditentukan haruslah merupakan pusat-pusat yang berfungsi sebagai pusat wilayah, dengan jangkauan regional.

Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan suatu lokasi Kantor Kabupaten yaitu antara lain: Jumlah penduduk, Fasilitas perdagangan, Intensitas hubungan antar kota. Dengan berbagai pertimbangan maka lokasi yang terpilih adalah di Kota Slawi, karena telah memenuhi persyaratan yang tertera di bab analisa dan sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota Slawi.

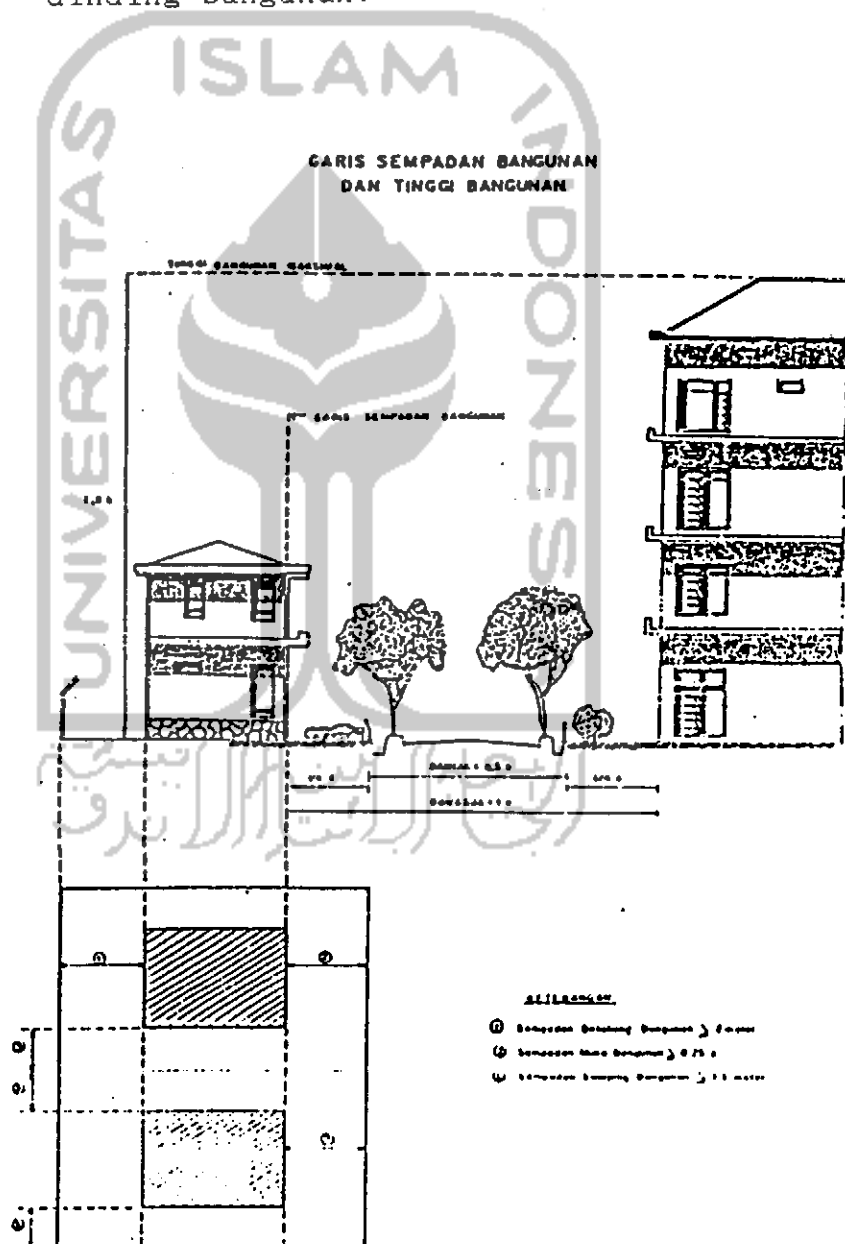
5.1.2. Penentuan Site

Penentuan pemilihan site mempertimbangkan :

- a. Kebutuhan luas site
- b. Persyaratan lingkungan yang meliputi :
 - Building Coverage Ratio (BCR) ditetapkan 50%
 - Floor Area Ratio (FAR) dengan angka KLB 4,5 untuk ketinggian bangunan 2 - 3 lantai

c. Garis sempadan (ROOI)

- Garis sempadan muka bangunan dan samping bangunan yang menghadap jalan ditetapkan $\frac{1}{2}$ dari lebar jalan
- Garis sempadan samping bangunan 1,5 dari dinding bangunan.



Gambar : 4.15. Peraturan garis sempadan bangunan

5.1.3. Pengolahan Tapak

1. Prinsip pengolahan tapak adalah :

- a. Prinsip Koordinatif, sebagai unsur lembaga pemerintahan.
- b. Prinsip Formalitas, Pencapaiannya dalam bentuk horizontal dan simetris.
- c. Prinsip keterbukaan, dalam kaitannya dengan keleluasan dan keakraban sebagai wadah pelayanan kepada masyarakat
- d. Prinsip kemudahan kejelasan pencapaiannya dengan cara mempertimbangkan tata letak sesuai dengan hirarki yang dicapai

2. Pengelompokan Organisasi Ruang Pengelompokan Organisasi Ruang berdasarkan pada hirarki pelayanannya dibagi menjadi :

- Kelompok publik : Kelompok fasilitas umum
- Kelompok semi publik : Kelompok ruang sekwilda
- Kelompok Ruang Privat: Kelompok ruang Bupati

5.2. Konsep Perancangan

Konsep tata ruang dimaksudkan agar didapatkan suatu optimalisasi kerja dari unit-unit kerja Kantor Bupati yang berdasarkan pada kebutuhan ruang yang dituntut oleh adanya kegiatan-kegiatan , persamaan sifat ruang, serta keterkaitan antar kegiatan. Keterkaitan disini maksudnya adalah sampai sejauh mana suatu kegiatan memerlukan kedekatan secara fisik dengan kegiatan lain, sehingga keduanya saling menunjang.

5.2.2. Besaran Ruang

Perhitungan besaran ruang dalam kantor Kabupaten Dati II Tegal didasarkan pada standar kebutuhan fungsional hirarki jabatan Pemerintahan yang ada dan perkiraan jumlah personil.

. Ratio pemakaian luas lantai menggunakan pedoman yang telah ditetapkan (Oleh Bappenas), yaitu :

- Ruang Pimpinan : 30 - 46 m²\orang
- Ruang pembantu Pimpinan : 10 - 16 m²\orang
- Ruang Staf/Karyawan : 6 - 10 m²\orang
- Ruang Rapat : + 2,5 m²\orang
- Ruang fasilitas umum : 0,6-2,5 m²\orang

. Perbandingan luas ruang adalah :

- Fungsi kegiatan Kantor (open space) : 60 - 70 %
- Fungsi Sirkulasi (circulation space)
- Fungsi umum dan pelayanan.

Perincian perhitungan luas masing-masing kelompok ruang kerja adalah sebagai berikut :

1. Kelompok Ruang Bupati

No	Nama Ruang	jumlah	Ratio	Luas Rg	Total
		personil	M2/Org	M2	
1.	R. Kerja Bupati	1	40	40	
2.	R. Staf+Ajudan	3	10	30	
3.	R. Rapat	40	2,5	100	
4.	R. Tunggu	10	1,5	15	
5.	R. Tamu	20	2,5	50	
6.	R. Istirahat	-	-	50	
					= 265

2. Kelompok Ruang Sekretaris Wilayah Daerah

No	Nama Ruang	Jumlah	Ratio	Luas Rg	Total
		personil	M2/Org	M2	
1.	R. Kerja	1	30	30	
2.	R. Ajudan	1	10	30	
3.	R. Rapat	15	2,5	40	
4.	R. Tunggu	6	1,5	10	
5.	R. Tamu	12	2,5	50	
6.	R. Istirahat	-	-	20	
					=139

3. Kelompok Ruang Asisten Sekretaris Bidang Pemerintahan

No	Nama Ruang	Jumlah personil	Ratio M2/Org	Luas Rg M2	Total
1.	R. Ass Sekr	1	24	24	
2.	R. Staf Ass				
	R. Kabag Pem	1	16	16	
	R. Kasubag Pe merintahan	5	10	50	
3.	R. Kabag Hukum				
	Org Tata Lingkungan	1	16	16	
	R. Kasubag	5	10	50	
	R. Adm hukum				
	Ortala	25	4	100	
4.	R. Kabag Humas	1	16	16	
	R. Kasubag Hu mas	3	10	30	
	R. Adm Bag Hu mas	12	4	48	
5.	R. Rapat	16	1,5	24	
	R. Tunggu	4	2,5	10	
	R. Arsip			13	
	R. Istirahat	-	-	13	
					= 590

4. Kel Ruang Ass Sekr Bid Ekon Pemb dan Kesra

No	Nama Ruang	Jumlah personil	Ratio M2/Org	Luas Rg M2	Total M2
1.	R. Ass Sekr	1	24	24	
	R. Staf Ass Sekret	4	6	24	
2.	R. Kabag Per ekonomian	1	16	16	
	R. Kasubag	3	10	30	
	R. Adm Bag perekono	52	4	208	
3.	R. Kabag Pemb	1	16	16	
	R. Kasubag pem	3	10	30	
	R. Adm Pemb	44	4	136	
4.	R. Kabag Kesra	1	16	16	
	R. Kasubag	3	10	30	
	R. Adm Kesra	36	4	144	
5.	R. Rapat	16	1,5	40	
	R. Tunggu	4	2,5	10	
	R. Arsip	-	-	13	
	R. Simpan	-	-	13	
					= 800

5. Kelompok Ruang ASS Sekretaris Bidang Umum

No	Nama Ruang	Jumlah personil	Ratio M2\Org	Luas Rg M2	Total
1.	R. Ass Sekr	1	24	24	
	R. Staf Ass Sekret	4	6	24	
2.	R. Kabag Keu	1	16	16	
	R. Kasubag Keuangan	3	10	30	
	R. Adm Bag Keuangan	79	4	316	
3.	R. Kabag Kepegawaian	1	16	16	
	R. Kasubag kepegawaian	3	10	30	
	R. Adm Bag Kepegawaian	58	4	232	
4.	R. Kabag Umum + Protokol	1	16	16	
5.	R. Rapat	16	1,5	40	
	R. Tunggu	4	2,5	10	
	R. Arsip	-	-	22	
	R. Simpan	-	-	22	
					= 1384

6. Kelompok Ruang Pertemuan/Balai Kesenian

No	Nama Ruang	Jumlah Personil	Ratio M2\Org	Luas Rg M2	Total
1.	Hall Utama	400	1,5	600	
2.	Belakang panggung, Pantry, Gudang, Toilet		20 = 20% ———	100 Jumlah = 720	$600 = 120$
3.	R.Service + Sirkulasi		= 25% ———	100	$x 720 = 180$

7. Kelompok Ruang Fasilitas Umum

No	Nama Ruang	Jumlah personil	Ratio M2/Org	Luas Rg M2	Total
1.	Galery	-	-	100	
2.	Kantin	100	1	100	
3.	Musholla	50	2	100	
4.	Koperasi	-	-	100	

5.	R. Olah raga	-	-	100	
6.	Dharma Wanita	-	-	80	
					= 580

8. Kelompok Ruang Fasilitas

No	Nama Ruang	Jumlah personil	Ratio M2/Org	Luas Rg M2	Total
1.	R. Pola Duta	100	2	200	
2.	R. Komputer	-	-	150	
3.	R. Pusat Arsip	-	-	120	
4.	R. Pers	50	1,5	75	
5.	R. Cetak	-	-	10	
6.	R. Jaga	-	-	20	
7.	R. Perpust	-	-	100	
8.	R. Pengemudi	-	-	20	
					= 695

5.2.3. Persyaratan Ruang

Persyaratan ruang berdasarkan pada karakteristik fungsinya harus bisa mencerminkan suasana yang sesuai dengan karakteristik kegiatan yang diwadahi meliputi sifat dan kegiatan yaitu :

- Formal

Suasana ruang kerja pada bagian formal harus mencerminkan suasana yang resmi, berwibawa, yaitu pada Kelompok Ruang Kerja Kantor Bupati sebagai lembaga Pemerintah Tertinggi di Daerah.

Suasana formal dapat dicapai dengan :

- Perencanaan pengaturan ruang-ruang yang simetris dengan hirarki tata kerja dan jabatan hirarki kegiatan

- Semi Formal

Suasana ruang kerja pada bagian semi formal, yaitu pada bagian pelayanan harus menerminkan suasana yang ramah dan terbuka karena fungsinya yang berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. Suasana ini dapat dicapai dengan pengaturan bentuk-bentuk ruang yang dinamis dan tidak kaku, dalam konfigurasi ruang pada bentuk bangunan.

5.2.4. Sistem Peruangan

- Sistem yang digunakan pada ruang kerja Staf digunakan sistem open lay out, hal ini dimaksudkan agar bisa tercapai optimalisasi

pengawasan dan koordinasi kegiatan.

- Pada ruang lay out menggunakan dinding pemisah dari partisi double teakwood (soft bord). Penggunaan dinding partisi sangat menguntungkan karena bisa dirubah pola bentuk ruangnya.

5.2.4. Sistem Pencahayaan

Sistem pencahayaan di dalam suatu bangunan harus memenuhi dapat memenuhi dua fungsi sebagai berikut :

1. Untuk dapat menerangi ruang-ruang dalam (interior) dan seluruh isinya.
2. Untuk dapat menerangi hal-hal khusus, seperti pencahayaan untuk membaca, atau untuk melihat benda-benda halus, karenanya pencahayaan untuk hal-hal tersebut hendaknya cukup terang dan dengan jangkauan yang cukup luas sehingga mekanisme visual kita dapat bekerja dengan efisien yang tinggi.

Sistem pencahayaan di dalam ruang Kerja Kantor Kabupaten dapat dibagi dua macam :

- Pemanfaatan cahaya alami, yaitu dengan menempatkan jendela dan bagian kerangka kerangkanya dibuat dengan menggunakan model yang sesuai dengan ukuran jendela dan pintunya sehingga sinar matahari akan lebih leluasa untuk masuk kedalam ruang. Jendela dan pintu ditempatkan disisi teras sebuah lorong yang panjang yang menghubungkan kedua ujung bangunan yang panjang.

- Pencahayaan buatan

Cahaya buatan adalah suatu sistem pengaturan cahaya buatan sehingga suatu benda dapat dilihat dalam batas-batas kegunaan tertentu.

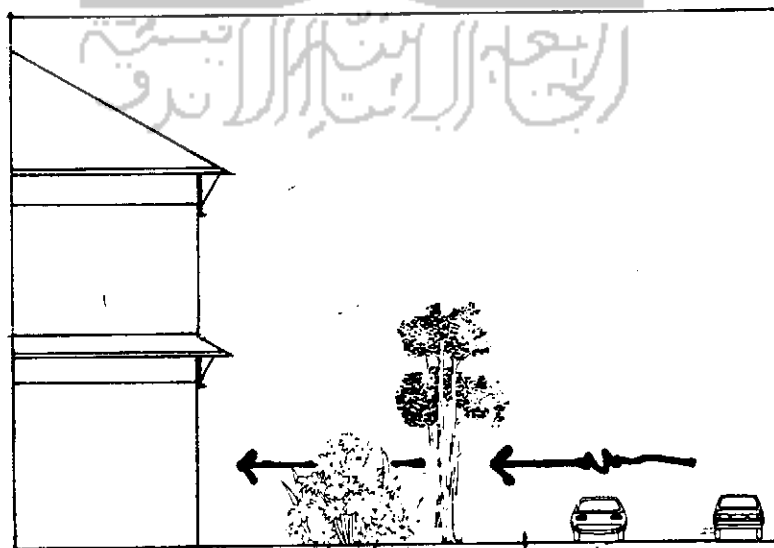
Jenis lampu yang digunakan

- Ruang kerja, digunakan lampu Fluorecent Rafid Start F 40 T 12 ww
- Lavatory, digunakan lampu pijar 4 watt

5.2.5. Penanggulangan kebisingan/noise

Kebisingan merupakan salah satu unsur pencemaran lingkungan yang memberikan dampak negatif langsung terhadap kegiatan dan kesehatan manusia.

Cara untuk menanggulangi intensitas suara dengan membuat tanaman sebagai pembatas dan mereduksi suara dari luar, sedangkan kebisingan dari dalam dengan menggunakan dinding penyerap bunyi (akustik interior).



Gambar 5.1 : Pohon sebagai barrier kebisingan

5.2.6. Konsep penampilan bangunan

- Bentuk yang teratur dan simetris, mencerminkan karakter fungsi bangunan kantor pemerintahan.
- Bentuk ruang bersifat multi guna dan mempunyai fungsi formal dan semi formal sebagai suatu lembaga negara.
- Bentuk arsitektur disesuaikan dengan bentuk yang sudah dikenal oleh masyarakat, sehingga keberadaannya tidak mengejutkan masyarakat.

5.2.7. Konsep struktur dan utilitas

a. Sistem struktur

Pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan sistem struktur :

- Struktur rangka berkaitan dengan luasan yang menentukan panjang bentang.
- Struktur dinding dan fondasi berkaitan dengan kemampuan menahan beban bangunan.
- Kemudahan pelaksanaan, menyangkut kesederhanaan sistem struktur, keawetan dan ketahanan, sehingga bisa mendukung nilai estetik.

b. Utilitas bangunan

1. Jaringan air bersih

Rencana penyediaan air bersih

- Untuk perkotaan dapat terlayani oleh PDAM
- Daerah-daerah yang belum terjangkau oleh PDAM maka sumber air bersih/air minum

dapat diperoleh dari mata air, air artesis, sumur dangkal atau air permukaan terutama di desa-desa.

2. Jaringan listrik

Rencana kebutuhan listrik di Kabupaten Dati II Tegal menggunakan aliran listrik dari PLN.

3. Jaringan riollering dan drainase kota.

- Untuk daerah yang dapat dijangkau oleh sistem pembuangan (sanitary savage) dapat dilakukan melalui saluran perkotaan (publik system).

- Untuk daerah yang tidak dapat dijangkau oleh sistem saluran dapat diterapkan sistem-sistem yang biasa dilakukan oleh tiap-tiap rumah tangga ataupun dilaksanakan secara komunal dengan sejumlah rumah yang berdekatan.

4. Pembuangan sampah

- Penduduk dapat mengelola pembuangan sampah dari rumah tangga ke bak sampah LKMD.

- Untuk rencana penyediaan sarana angkutan sampah memakai truk dan gerobak, sedangkan rencana pembuangan akhir dibuang di tempat yang jauh dari lokasi penduduk dan jauh dari jalan antar kecamatan.

5. Jaringan telepon

Sistem hubungan telepon di Kabupaten Tegal menggunakan sistem otomatis.



الجامعة الإسلامية الرانيري

DAFTAR PUSTAKA

- Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dati II Tegal Propinsi Daerah Tingkat II Jawa-Tengah Tahun 1992-2002.
- Pra Rancang Bangun Di Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Dati II Tegal Di Slawi.
- Rencana Umum Tata Ruang Kota Slawi Tahun 1987-2009.
- Ching, K.D.F. Bentuk Ruang Dan Susunannya.
- Charles Moore, 1949 - 1986. Building And Projects.
- Cornelis V.D. Edisi ke III. Ruang dalam Arsitektur.
- Doelle, L.L., 1986. Akustik Dan Lingkungan, Erlangga, Jakarta.
- Ibrahim. M.J., Drs. 1991. Prospek Otonomi Daerah. Dahara Prize, Semarang - Indonesia.
- Kansil, etc, Drs. 1987. Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah. Aksara Baru, Jakarta.
- Marsono, Drs. 1986. Himpunan Peraturan Tentang Pemerintahan Di Daerah. Djambatan - Jakarta.
- Neufert. 1980. Architects' Data, Granada, New York.
- Sugiharjo, M. 1978. Tesis. Jurusan FT, UGM.
- Soecipto, Ir. 1984. Otonomi Daerah. Ghalia Indonesia - Jakarta.
- S, Pamudji, MPA, Prof., "Drs. 1935. Ekologi Administrasi Negara, P.T. Bina Aksara, Jakarta.

